

SKRIPSI

**PEMBERDAYAAN KELOMPOK TANI OLEH DINAS PERTANIAN DAN
BALAI PENYULUH PERTANIAN PERIKANAN DAN KEHUTANAN
(BP3K) KECAMATAN BARRU DALAM MENINGKTKAN HASIL
PANEN PADI DI DUSUN CAMMING, DESA PALAKKA,
KABUPATEN BARRU**

Disusun dan diusulkan oleh:

RAPIKA ANNISA

105641105616



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2021

**PEMBERDAYAAN KELOMPOK TANI OLEH DINAS PERTANIAN DAN
BALAI PENYULUH PERTANIAN PERIKANAN DAN KEHUTANAN
(BP3K) KECAMATAN BARRU DALAM MENINGKTKAN HASIL
PANEN PADI DI DUSUN CAMMING, DESA PALAKKA,
KABUPATEN BARRU**

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Ilmu Pemerintahan

Disusun dan Diajukan Oleh

RAPIKA ANNISA

Nomor Stambuk: 105641105616

Kepada

03/03/2021

1 cap
Srb. Alumni

12/014/1PM/2100
ANN

P

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2021

PERSETUJUAN

Judul Proposal Penelitian : Pemberdayaan Kelompok Tani Oleh Dinas Pertanian
Dan Balai Penyuluh Pertanian Perikanan dan
Kehutanan Kecamatan Barru Dalam Meningkatkan
Hasil Panen Padi Di Dusun Camming, Desa Palakka,
Kabupaten Barru

Nama Mahasiswa : Rapika Annisa

Nomor Stambuk : 105641105616

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II


Drs. H. Ansyari Mone, M.Pd

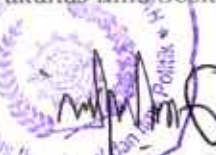

Hamrun, S.IP., M.Si

Mengetahui

Dekan

Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik


Dr. Hj. Irvani Malik, S.Sos., M.Si.


Dr. Nuryanti Mustari, S.IP, M.Si

PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh Tim Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan surat keputusan/undangan menguji ujian skripsi Dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor : 0156/FSP/A.3-VIII/II/42/2021 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S.1) dalam Program Studi Ilmu Pemerintahan di Universitas Muhammadiyah Makassar pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021.

TIM PENILAI

KETUA

Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si

SEKRETARIS

Dr. Burhanuddin, S.Sos., M.Si

Penguji :

1. Dr. H. Muhammadiyah, M.Si (Ketua)
2. Dr. Amir Muhiddin, M.Si
3. Hardianto Hawing, ST., MA

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Rapika Annisa

Nomor Stambuk : 105641105616

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Pernyataan bahwa benar karya ilmiah adalah hasil penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau ditulis/dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku.

Makassar, 25 Februari 2021

Yang menyatakan.


Rapika Annisa

ABSTRAK

Rapika Annisa 2020. Pemberdayaan Kelompok Tani Oleh Dinas Pertanian Dan Balai Penyuluh Pertanian Perikanan Dan Kehutanan Kecamatan Barru Dalam Meningkatkan Hasil Panen Padi Di Dusun Camming, Desa Palakka, Kabupaten Barru (dibimbing oleh H. Ansyari Mone dan Hamrun)

Melalui pemberdayaan masyarakat petani secara intensif maka akan mampu mengangkat harkat dan martabat bagi masyarakat petani dalam berusaha. Arti pentingnya pemberdayaan masyarakat adalah menciptakan kemandirian, agar masyarakat mampu berbuat, memahami serta mengaplikasikan dalam berbagai kegiatan pembangunan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Pemberdayaan Kelompok Tani Oleh Dinas Pertanian Dan Balai Penyuluh Pertanian Perikanan dan Kehutanan Kecamatan Barru Dalam Meningkatkan Hasil Panen Padi Di Dusun Camming, Desa Palakka, Kabupaten Barru.

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan tipe penelitian fenomenologi. Informan penelitian berjumlah delapan orang dengan Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Analisis data mencakup reduksi data, penyajian data, verifikasi data serta penarikan kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa (1) *Enabling*, yaitu memungkinkan pemerintah termasuk dinas pertanian dan BP3K dalam memberdayakan masyarakat sudah terlaksana, pemberian bantuan dana dan alat alat pertanian kepada kelompok tani di Dusun Camming, Desa Palakka dalam rangka mempermudah petani mulai dari pengolahan lahan pertanian sampai pada hasil pengelolaan panen padi. (2) *Empowering*, yaitu peningkatan kapasitas petani oleh pemerintah dalam memberdayakan masyarakat petani dengan cara pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan terlaksana sudah cukup bagus karena dalam penyuluhan sudah tepat dalam memberikan pelatihan yang memiliki pengetahuan dan keterampilan. (3) *Protecting*, yaitu pemberian perlindungan kepada petani oleh pemerintah dalam Pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian, berdasarkan hasil observasi penulis temukan dilapangan pembatasan penjualan oleh pemerintah sudah terlaksana namun belum maksimal pada sarana dan prasarana yang belum memadai sedangkan kebutuhan sarana penting disampaikan kepada Badan penyuluh pertanian karena sarana adalah pendukung dalam kegiatan usaha badan penyuluh pertanian.

Kata kunci: Pemberdayaan masyarakat, Kelompok tani

KATA PENGANTAR

Tiada kata yang patut di ucapakan seorang hamba selain puji syukur kehadiran Tuhan yang Maha Esa yang telah melimpahkan hidahnya dan memberikan kesempatan dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul "Pemberdayaan Kelompok Tani Oleh Dinas Pertanian Dan Balai Penyuluh Pertanian Perikanan dan Kehutanan Kecamatan Barru Dalam Meningkatkan Hasil Panen Padi Di Dusun Camming, Desa Palakka, Kabupaten Barru". Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana ilmu pemerintahan dari program studi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar. Saya menyadari bahwa dalam mengerjakan penyusunan skripsi ini tidaklah mudah, namun saya bersyukur karena banyak pihak yang membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, dan ucapan terima kasih yang terdalem penulis kepada kedua orang tua tercinta ayahanda Suhardin dan Ibunda Napisa, karena semua usaha penulis tidak berarti apa-apa tanpa ada dorongan semangat yang luar biasa dari beliau yang rela melakukan segala hal, memberikan doa dan motivasi yang tulus serta nasehat dan bimbingan, serta membesarkan penulis dengan penuh kasih sayang. Terima kasih juga untuk saudara perempuan dan saudara laki-laki penulis yang selalu menyayangi dan memberikan semangat untuk terus melanjutkan Pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Selanjutnya tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuannya terutama kepada :

1. Bapak Drs. H. Ansyari Mone, M.Pd. selaku pembimbing I dan Bapak Hamrun, S.IP., M.Si. selaku pembimbing II serta Penasehat Akademik (PA) penulis yang selalu dengan rendah hati membimbing dan mengarahkan penulis, melakukan koreksi dan perbaikan yang sangat berharga sejak dari awal sampai selesainya Skripsi ini sekaligus sebagai penguji pada ujian skripsi penulis.
2. Ibu Dr. Nuryanti Mustari, S.IP, M.Si dan Bapak Ahmad Harakan, S.IP, M.Hi selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Makassar sekaligus sebagai salah satu penguji pada ujian skripsi penulis.
3. Ibu Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar sekaligus sebagai salah satu penguji pada ujian skripsi penulis.
4. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
5. Segenap Dosen serta staf Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah memberi bekal ilmu pengetahuan dan pelayanan kepada penulis selama menempuh pendidikan di Universitas Muhammadiyah Makassar.

6. Pihak Kantor BP3K (Balai Penyuluh Pertanian Perikanan, Dan Kehutanan) Kecamatan Barru yang telah membantu saya dalam memberikan informasi terkait penelitian ini.
7. Saudara dari awal masuk kampus IP.B sekaligus teman kelas dari semester 1 sampai semester 8.
8. Teman-teman dekat yang selalu membantu dan memberikan dorongan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi.
9. Keluarga besar penulis yang telah memberikan support dan dorongan dalam penulisan skripsi, terutama suami tercinta Sulfajri Syamsuddin.

Akhir kata penulis mengharapkan kiranya skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada para pembaca guna menambah Khasanah Ilmu Pengetahuan terutama yang berkaitan dengan Ilmu Pemerintahan.

Billahi Fii Sabililhaq Fastabiqul Khairat

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatu

Makassar, 25 Februari 2021

Penulis



RAPIKA ANNISA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
PENERIMAAN TIM.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian	6
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu	7
B. Kajian Teori.....	9
C. Kerangka Pikir	24
D. Fokus Penelitian	26
E. Deskripsi Fokus Penelitian	26
BAB III. METODE PENELITIAN	
A. Waktu Dan Lokasi Penelitian	27
B. Jenis Dan Tipe Penelitian.....	27

C. Sumber Data.....	28
D. Informan Penelitian.....	28
E. Teknik Pengumpulan Data.....	29
F. Teknik Analisis Data.....	30
G. Teknik Pengabsahan Data.....	31

BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian.....	34
B. Hasil Pembahasan.....	46

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	74
B. Saran.....	75

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.0 Tabel Informan Penelitian.....	29
Tabel 1.1 Luas Daerah dan Pembagian Wilayah Administratif Kabupaten Barru.....	36
Tabel 1.2 Balai Penyuluh Pertanian (BPP) Kec. Barru	41
Tabel 1.3 Beberapa Sarana Dan Prasarana Kelompok Tani Pamarlete Dusun Camming, Desa Palakka, Kec. Barru Kab. Barru.....	49
Tabel 1.4 Jenis Kegiatan Penyuluhan dan Pendampingan Dinas Pertanian dan Balai Penyuluh Pertanian Kec. Barru, Kab. Barru 2018/2019	61
Tabel 1.5 Hasil Produksi Padi Dusun Camming Desa Palakka Kabupaten Barru.....	73

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.0 Kerangka Pikir	25
Gambar 1.1 Wawancara Dengan Kepala Bp3k	81
Gambar 1.2 Wawancara Dengan Ppl Desa Palakka	81
Gambar 1.3 Bersama Kepala Bp3k Dan Ppl Desa Palakka	82
Gambar 1.4 Bersama Penyuluh Pertanian Kecamatan Barru	82
Gambar 1.5 Tempat Penelitian	83
Gambar 1.6 Bersama Ketua Kelompok Tani Pamarlete I	84
Gambar 1.7 Bersama Ketua Kelompok Tani Pamarlete II	84
Gambar 1.8 Wawancara Dengan Ketua Kelompok Pamarlete III	85
Gambar 1.9 Wawancara Dengan Anggota Kelompok Tani II	85
Gambar 2.0 Bersama Dengan Anggota Kelompok Tani Pamarlete I	86
Gambar 2.1 Peta Wilayah Kerja Ppl	87
Gambar 2.2 Daftar Hadir Pegawai	87
Gambar 2.3 Struktur Organisasi Bp3k Kec. Barru	88
Gambar 2.4 Data Kelembagaan Petani Kec. Barru	88
Gambar 2.5 Surat Penelitian Lp3m	89
Gambar 2.6 Surat Izin Ptsp	90
Gambar 2.7 Surat Rekomendasi Izin Ptsp Barru	91
Gambar 2.8 Surat Rekomendasi Izin Dari Dinas Pertanian	92

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masyarakat desa dalam kehidupan sehari-hari biasanya lebih menggantungkan hidupnya pada alam. Alam merupakan segalanya bagi penduduk desa, karena alam memberikan apa yang dibutuhkan manusia bagi kehidupannya. Mayoritas masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada hasil alam sebagian besar mempunyai mata pencaharian sebagai petani. Besarnya peranan pertanian di Indonesia memberikan motivasi pedesaan untuk memiliki lahan pertanian yang dapat dijadikan sebagai sumber produksi, oleh karena itu mereka berupaya dengan berbagai cara untuk memenuhi lahan pertanian baik yang ada di wilayah tempat tinggalnya maupun diluar desanya. Mereka akan memenuhi kebutuhan hidup keluarganya dengan memiliki lahan pertanian tersebut. Sebagian dari mereka biasanya hanya bekerja di sektor pertanian karena disesuaikan dengan latar belakang pendidikan yang dimiliki.

Bila dilihat dari potensi sumberdaya alam sesungguhnya Desa Palakka memiliki prospek yang cukup baik sebagai penghasil produksi beras yang cukup menjanjikan apabila masyarakat desa sepenuhnya dapat menyadari bahwa bidang pertanian dapat dijadikan sebagai asset untuk dapat menjanjikan masa depan mereka. Namun dari hasil usaha tani terutama produksi hasil pertanian seperti padi sawah dan padi lading belum banyak memberikan manfaat bagi peningkatan taraf hidup masyarakat petani. Usaha pemberdayaan yang dilakukan pada masyarakat petani sampai saat ini belum banyak

memberikan manfaat terutama dalam meningkatkan produksi dan pendapatan masyarakat petani. Melalui pemberdayaan masyarakat petani secara intensif maka akan mampu mengangkat harkat dan martabat bagi masyarakat petani dalam berusaha. Arti pentingnya pemberdayaan masyarakat adalah menciptakan kemandirian agar masyarakat mampu berbuat, memahami serta mengaplikasikan dalam berbagai kegiatan pembangunan. Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui beberapa kegiatan antara lain peningkatan prakarsa dan swadaya masyarakat, perbaikan lingkungan dan pengembangan usaha ekonomi desa serta kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menaikkan hasil produksinya.

Kegiatan pemberdayaan petani dalam pembangunan pertanian berperan sebagai jembatan yang menghubungkan antara praktik dan pengetahuan yang diperoleh oleh petani agar petani dapat melakukan praktik-praktik yang mendukung usaha tani maka petani membutuhkan informasi maupun inovasi dalam bidang pertanian. Informasi tersebut dapat diperoleh petani antara lain dari Balai Penyuluh Pertanian melalui penyelenggara kegiatan penyuluhan pertanian. Pada umumnya, petani hanya bekerja sendiri dalam mengelola lahan pertaniannya, Petani juga merupakan seorang yang mempunyai hak dan kewajiban untuk dapat meningkatkan kualitas dan pengelolaan pertanian. Banyak petani yang sering mengalami berbagai masalah dalam pengelolaan lahan, hasil dan pendapatan mereka. Mereka membutuhkan sebuah adanya informasi, pendidikan, pelatihan, ataupun bimbingan. Hal ini diperlukan

karena mereka juga butuh untuk menjadi petani yang lebih baik dan terus meningkatkan hasil produksi pertanian.

Berdasarkan undang-undang republik Indonesia nomor 19 tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani pada pasal 1 ayat 2 bahwa: "pemberdayaan petani adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan petani dalam melaksanakan usaha tani yang lebih baik melalui Pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penguatan kelembagaan petani".

Dusun Camming Desa Palakka merupakan daerah yang terletak di wilayah Kecamatan Barru Kabupaten Barru yang menjadikan pertanian sebagai mata pencaharian utama dimana sebagian besar penduduknya bekerja sebagai petani. Salah satu permasalahan di Dusun Camming, Desa Palakka berdasarkan survey awal penulis kurangnya pembinaan serta pelatihan kepada masyarakat petani dan cenderung masyarakat petani masih menggunakan pola-pola lama sehingga pertanaman terlalu terkuras dalam mengelola dan hasil tidak maksimal. Juga belum bisa melakukan pertanian secara modern dimana Hal ini mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat petani. Dan juga masyarakat petani di Dusun Camming Desa Palakka yang tergabung dalam kelompok tani merupakan masyarakat yang harus di berdayakan karena dengan upaya meningkatkan taraf hidup petani tidak dapat dilakukan apabila tidak terdapat kerjasama antara pemerintah dan masyarakat di daerah ini,

untuk itu harus dapat dilakukan demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat petani di Dusun Camming, Desa Palakka.

Banyak persoalan yang dihadapi oleh petani baik yang berhubungan langsung dengan produksi dan pemasaran dan hasil-hasil pertaniannya maupun yang di hadapi dalam kehidupannya sehari-hari. Sehingga tidak hanya aspek ekonomi saja tetapi juga aspek-aspek sosial dan kebudayaan serta aspek tradisi semuanya memegang peranan penting dalam tindakan-tindakan petani. Masalah yang sering dihadapi oleh petani juga dari segi hasil produksi biasanya berupa harga penjualan hasil tani yang sangat rendah. Dengan demikian petani tidak bisa memenuhi kekurangan biaya produksi pertanian dan biaya kebutuhan hidup karena adanya kerugian.

Berdasarkan survey awal penulis, perkembangan dan perjalanan kelompok tani di Dusun Camming Desa palakka memiliki 3 kelompok tani yaitu kelompok tani pamarlete I di ketua oleh kasman dan beranggotakan 40 orang dan luas lahan 62 ha, kelompok tani pamarlete II di ketua oleh Hasanuddin S.pd dan jumlah anggota 35 orang dengan luas lahan 40 ha, kelompok tani pamarlete III di ketua oleh Bahtiar, S.Pd dan beranggotakan 58 orang dengan luas lahan 62 ha. Dan semua kelompok tani di dusun camming di berdayakan, Hal tersebut dapat dilihat pada kelengkapan alat-alat pertanian yang ada antara lain seperti tersediaannya sawah atau lahan pertanian untuk tes bibit, lumbung padi, alat rontok padi, kios saprodi (penyedia benih/bibit unggul, pupuk), traktor, alat penyemprot hama dan sebagainya, tinggal bagaimana agar masyarakat dapat di berdayakan, Oleh karena itu pemerintah

diharapkan dapat memberikan pelatihan-pelatihan untuk peningkatan sumber daya manusia, contohnya pelatihan dalam pembuatan pupuk alami untuk efisiensi penggunaan pupuk kimia yang harganya semakin lama semakin melambung tinggi, dengan adanya pelatihan dalam pembuatan pupuk alami dapat menekan biaya produksi sehingga masyarakat petani dapat di berdayakan.

Melalui tahap perumusan ini, pemerintah diharapkan mampu menganalisa keputusan-keputusan kondisional yang ada untuk ditetapkan menjadi sebuah tindakan yang harus dijalankan seperti: kondisi lahan pertanian yang ada di Dusun Camming, Desa Palakka terbilang cukup subur tapi sangat memerlukan air, oleh karena itu perlu adanya upaya irigasi/pengairan untuk memenuhi kebutuhan lahan pertanian, penggunaan bibit unggul yang belum sepenuhnya dilakukan oleh para petani, pemakaian pupuk yang masih sangat bergantung kepada pupuk non organik, yang dipasarkan dengan harga yang lumayan mahal, waktu menanam dan waktu memanen yang tidak secara bersamaan.

Itulah mengapa saya tertarik meneliti tentang "Pemberdayaan Kelompok Tani Oleh Dinas Pertanian Dan Balai penyuluh pertanian Perikanan dan Kehutanan Kecamatan Barru Dalam Meningkatkan Hasil Panen Padi Di Dusun Camming, Desa Palakka, Kabupaten Barru, karena dengan adanya program yang dilaksanakan baik dari pemerintah maupun kegiatan mandiri kelompok tani yang dapat meningkatkan hasil panen padi masyarakat.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana Pemberdayaan Kelompok Tani Oleh Dinas Pertanian Dan Balai Penyuluh Pertanian Perikanan dan Kehutanan Kecamatan Barru Dalam Meningkatkan Hasil Panen Padi di Dusun Camming, Desa Palakka, Kabupaten Barru ?

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui Pemberdayaan Kelompok Tani Oleh Dinas Pertanian Dan Balai Penyuluh Pertanian Perikanan dan Kehutanan Kecamatan Barru Dalam Meningkatkan Hasil Panen Padi Di Dusun Camming, Desa Palakka, Kabupaten Barru.

D. Manfaat penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi atau saran dan sumbangan pemikiran pengelola bidang pembangunan masyarakat, terutama pemikiran tentang pemberdayaan masyarakat.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini agar dapat memberikan masukan yang positif kepada pengurus maupun pengelola, anggota kelompok tani dalam mengembangkan dan mengelola organisasi kelompok tani pamarlete di Dusun Camming, Desa Palakka.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang di gunakan dalam mengkaji penelitian yang di lakukan. Dari penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penulis. Namun penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis. Berikut beberapa penelitian yang berhubungan dengan penelitian yang di kaji telah menghasilkan kesimpulan yang beragam sesuai dengan kajian penelitiannya yaitu :

Penelitian oleh Ardianus Sodi Liwu (2019), dalam penelitiannya tentang Strategi Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Kelompok Tani, menunjukan bahwa dalam menciptakan suasana untuk mengembangkan potensi desa khususnya kelompok tani, pemerintah telah mendatangkan pihak penyuluh untuk membantu dalam meningkatkan pemahaman kelompok tani agar dapat mengembangkan potensi yang ada. Selain itu, strategi pemerintah desa untuk meningkatkan kapasitas kelompok tani dengan memperkuat potensi yang ada dan melindungi kelompok tani dari berbagai persaingan yang terjadi pemerintah desa sudah melakukan monitoring dan sosialisasi dengan tujuan agar kelompok tani lebih sejahtera.

Penelitian oleh Jova Jalinsri Engelina Langi (2015), dalam penelitiannya tentang Strategi Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Kelompok Tani Di Desa Popontolen Kecamatan Tumpaan Kabupaten Minahasa Selatan, strategi pemerintah desa tidak diterapkan dengan baik dan berjalan ditempat. Ada beberapa kelompok tani di desa ini yang tidak diberdayakan oleh pemerintah. Selain faktor pemerintah, kemampuan sumberdaya manusia juga berpengaruh dalam perkembangan kelompok tani di Desa Papontolen.

Penelitian oleh Edi Irawan (2017), dalam penelitiannya tentang Strategi Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Kelompok Tani Di Desa Tambe Kecamatan Bolo Kabupaten Bima, strategi pemerintah desa tidak diterapkan dengan baik dan Pemerintah kurang peduli akan kesejahteraan petani di Desa Tambe, hal ini dilihat dari tidak adanya tindakan pemerintah dalam mengembangkan potensi-potensi yang ada didesa. Tidak adanya tindakan pemerintah ketika kelompok-kelompok tani berhenti beroperasi.

Dari beberapa penelitian diatas, persamaan penelitian ini adalah sama sama membahas pemberdayaan kelompok petani. Tetapi yang membedakan dengan penelitian ini memfokuskan pada pemberdayaan masyarakat petani dalam meningkatkan hasil panen padi melalui program kelompok tani. Sedangkan penelitian terdahulu yang pertama, kedua dan ketiga penelitiannya hampir sama yang membahas tentang strategi pemerintah desa dalam pemberdayaan kelompok tani, dimana strategi membahas tentang cara pemerintah dalam memberdayakan kelompok tani.

B. Kajian Teori

a. Konsep Pemberdayaan

Pemberdayaan (*empowerment*) berarti memberikan dorongan dan motivasi kepada masyarakat/individu untuk menggali sumber daya yang dimiliki dan kemudian di tingkatkan kualitasnya agar mampu mandiri Studio driya (dalam Wahyuni, 1998). Adapun pengertian pemberdayaan menurut Zubaedi (dalam Iskandar, 2007) adalah : "Menyediakan sumber daya, pengetahuan dan keterampilan, kesempatan dalam rangka meningkatkan kemampuan warga miskin yang menentukan masa depannya sendiri serta berpartisipasi dalam kehidupan masyarakatnya lainnya. Pemberdayaan adalah sekumpulan kegiatan yang memperkuat kekuasaan atau kebudayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu yang menghadapi masalah kemiskinan dan mempunyai tujuan untuk mencapai sebuah perubahan sosial yaitu masyarakat yang berdaya, mempunyai kekuasaan atau mempunyai pengetahuan, dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial, menurut Sofa (dalam Loedy, 2020)

Pemberdayaan (*empowerment*), pada intinya ditujukan untuk membantu klien memperoleh daya dalam mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan di lakukan yang terkait diri mereka, termasuk mengurangi efek hambatan pribadi sosial dalam melakukan tindakan. Hal yang dilakukan melalui peningkatan kemampuan dan rasa percaya diri untuk menggunakan daya yangia miliki, antara lain melalui

transfer daya dari lingkungannya, Menurut Payne (dalam Sugiri, 2012). Pemberdayaan yang intinya membahas bagaimana individu, kelompok, ataupun komunitas berusaha untuk membentuk masa depan yang sesuai mereka inginkan serta berusaha mengontrol kehidupan mereka Shallow (dalam Maspaitea, 2014).

Menurut teori Ilmu Jiwa, bahwa manusia memiliki berbagai daya, yakni daya atau kekuatan berfikir, bersikap, dan bertindak. Daya-daya itulah yang harus ditumbuhkembangkan pada manusia dan kelompok manusia agar tingkat berdayanya optimal untuk mengubah diri dan lingkungannya. Pemberdayaan ini mempunyai dua arah tujuan, yaitu terlepas dari belenggu kemiskinan dan keterbelakangan serta memperkuat posisi dalam struktur kekuasaan pada lapisan masyarakat. Pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan dalam memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang menghadapi masalah kemiskinan. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan mengarah pada keadaan atau keberhasilan yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial; yaitu masyarakat yang berdaya, mempunyai kekuasaan atau pengetahuan serta kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, dapat menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, ikut berpartisipasi dalam kegiatan sosial,

dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya, oleh sipahelut (dalam Muhammad, 2019).

Konsep pemberdayaan menurut Friedman (dalam Agus, 1996) dalam hal ini pembangunan alternatif menekankan keutamaan politik melalui otonomi pengambilan keputusan untuk melindungi kepentingan rakyat yang berlandaskan pada sumberdaya pribadi, langsung melalui partisipasi, demokrasi dan pembelajaran sosial melalui pengamatan langsung. Hal tersebut berbeda dengan apa yang dikemukakan oleh Nugroho (dalam Iskandar, 2007) yang menyatakan sebagai berikut : Pemberdayaan adalah konsep yang lahir sebagai suatu strategi dalam menjalankan pembangunan yang berakarkan kerakyatan yaitu upaya terarah menampakkan keperpihakan dan ditujukan kepada masyarakat yang memerlukan. Pemberdayaan diaktualisasikan dengan partisipasi melalui pendampingan untuk mentransfer ilmu pengetahuan (*transfer of knowledge*) dalam kelompok yang terorganisir dengan cara belajar bersama terhadap diri dan lingkungan.

Pranarka dan Vidhyandika (dalam Musa, 2017) menjelaskan pemberdayaan adalah upaya menjadikan suasana kemanusiaan yang adil dan beradab menjadi semakin efektif secara struktural, baik di dalam kehidupan keluarga, masyarakat, negara, regional, internasional, maupun dalam bidang politik, ekonomi, dan lain sebagainya.

b. Konsep Pemberdayaan Masyarakat

1. Pengertian pemberdayaan masyarakat

Pemberdayaan masyarakat adalah peningkatan atau kemampuan orang atau kelompok lemah terkait akses informasi ke sumber daya, partisipasi atau keterlibatan dalam pembangunan, memegang pertanggungjawaban pihak yang mempengaruhi kehidupan mereka, dan kemampuan membuat keputusan dengan dukungan lembaga lokal Bhimo (dalam Loedy, 2020).

World Bank (dalam Margayaningsih, 2016) mengartikan pemberdayaan sebagai upaya untuk memberikan kesempatan dan kemampuan kepada kelompok masyarakat (miskin) untuk mampu dan berani bersuara (*voice*) atau menyuarakan pendapat, ide, atau gagasan-gagasannya, serta kemampuan dan keberanian untuk memilih (*choice*) sesuatu (konsep, metode, produk, tindakan, dll) yang terbaik bagi pribadi, keluarga, dan masyarakatnya. Dengan kata lain, pemberdayaan masyarakat merupakan proses meningkatkan kemampuan dan sikap kemandirian masyarakat. Sedangkan Menurut Adisasmita, Pemberdayaan masyarakat adalah upaya pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya masyarakat pedesaan yang lebih efektif dan efisien, seperti:

- a. Aspek masukan atau input (Sumber Daya Manusia, dana, peralatan atau sarana, data, rencana, teknologi)
- b. Aspek proses (pelaksanaan, monitoring dan pengawasan)

c. Aspek keluaran dan out put (pencapaian sasaran, efektivitas dan efisiensi) berkelanjutan.

Menurut Suharto (dalam Mulyawan, 2016) pemberdayaan masyarakat dimaknai sebagai sebuah proses dan tujuan. Maksudnya:

1. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu yang mengalami masalah kemiskinan.
2. Sebagai tujuan, pemberdayaan menunjuk pada keadaan yang ingin dicapai oleh perubahan sosial, yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi maupun sosial seperti kepercayaan diri, menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya.

Menurut (Fahrudin, 2012) pemberdayaan masyarakat yaitu konsep dalam pembangunan ekonomi yang terangkai dalam nilai-nilai masyarakat untuk membangun paradigma baru dalam pembangunan yang bersifat *people, centered, participatory*, dalam rangka untuk memberdayakan masyarakat dapat dilihat dari 3 aspek :

- a) *Enabling*, yaitu menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang.
- b) *Empowering*, yaitu meningkatkan kapasitas dengan memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat.

- c) *Protecting*, yaitu melindungi kepentingan dengan mengembangkan sistem perlindungan bagi masyarakat yang menjadi subjek pengembangan.

Menurut Widjaja (dalam Almasri & Deswimar, 2004) pemberdayaan masyarakat adalah upaya meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat, sehingga masyarakat dapat mewujudkan jati diri, harkat dan martabatnya secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri baik di bidang ekonomi, sosial, agama, dan budaya. Pemberdayaan masyarakat terutama di pedesaan tidak cukup hanya dengan upaya meningkatkan produktivitas, memberikan kesempatan usaha yang sama atau modal saja, tetapi harus diikuti pula dengan perubahan struktur sosial ekonomi masyarakat, mendukung berkembangnya potensi masyarakat melalui peningkatan peran, produktivitas dan efisiensi.

Pemberdayaan masyarakat sebagai suatu proses adalah suatu kegiatan yang berkesinambungan (*an-going*) sepanjang komunitas itu masih ingin melakukan perubahan dan perbaikan, dan tidak hanya terpaku pada suatu program saja, oleh Hogan (dalam Retno et al., 2015). Pemberdayaan masyarakat petani adalah keterkaitan antara pemberian akses bagi masyarakat, lembaga dan organisasi masyarakat dalam upaya meningkatkan produktivitas dan kemandirian masyarakat petani, oleh Sumardi Dan Evers (dalam Rahayu, 2010). Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang

merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan, yakni yang bersifat *“people centred, participatory, empowering, and sustainable”*, oleh Chamber (dalam Kartasmita, 1997).

Sumodingrat (dalam Iskandar, 2007) memberikan pengertian pemberdayaan masyarakat menyangkut dua kelompok yang saling terkait, yaitu: “Masyarakat yang belum berkembang sebagai pihak yang harus diberdayakan dan pihak yang menaruh kepedulian sebagai pihak yang memberdayakan. Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan upaya mengembangkan kondisi dan situasi sedemikian rupa sehingga masyarakat memiliki daya dan kesempatan untuk mengembangkan kehidupannya.

2. Tahap Pemberdayaan Masyarakat

Tahapan kegiatan pemberdayaan masyarakat menurut Totok dan Poerwoko (dalam Loedy, 2020) pada setiap individu dalam suatu organisasi merupakan suatu siklus kegiatan yang terdiri dari:

- 1) Menumbuhkan keinginan pada diri seseorang untuk berubah dan memperbaiki, yang merupakan titik awal perlunya pemberdayaan.
- 2) Menumbuhkan kemauan dan keberanian untuk melepaskan diri dari kesenangan/kenikmatan dan atau hambatan-hambatan yang dirasakan, untuk kemudian mengambil keputusan mengikuti

pemberdayaan demi terwujudnya perubahan dari perbaikan yang diharapkan.

- 3) Mengembangkan kemampuan untuk mengikuti atau mengambil bagian dalam kegiatan pemberdayaan yang memberikan manfaat atau perbaikan keadaan.
- 4) Peningkatan peran atau partisipasi dalam kegiatan pemberdayaan yang telah dirasakan manfaatnya.
- 5) Peningkatan peran dan kesetiaan pada kegiatan pemberdayaan, yang ditunjukkan berkembangnya motivasi-motivasi untuk melakukan perubahan.
- 6) Peningkatan efektivitas dan efisiensi kegiatan pemberdayaan.

Adapun tahapan pemberdayaan masyarakat menurut Soekanto (dalam Maryani, 2019), yaitu melalui Tahap persiapan, tahap pengkajian, tahap perencanaan alternatif, tahap performalisasi rencana aksi, tahap implementasi, tahap evaluasi, tahap terminasi.

Menurut Sumodiningrat (dalam Iskandar, 2007) terdapat tahap-tahap yang harus dilalui dalam melakukan pemberdayaan masyarakat adalah meliputi:

- 1) Tahap penyadaran dan pembentukan perilaku sadar dan peduli sehingga merasa membutuhkan peningkatan kapasitas diri.
- 2) Tahap transformasi kemampuan kerja terbuka wawasan pengetahuan, kecakapan, keterampilan, agar membuka wawasan

dan memberikan keterampilan dasar sehingga dapat mengambil peran di dalam pembangunan.

- 3) Tahap peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan, keterampilan sehingga terbentuklah inisiatif dan kemampuan inovatif untuk mengantarkan pada kemandirian.

3. Teknik Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Suhendra (dalam Febrianti, 2018) mengemukakan terdapat beberapa teknik pemberdayaan masyarakat antara lain:

- 1) Teknik *Participatory Rural Appraisal* (PRA), menurut Driyamedia (dalam Febrianti, 2018) PRA yaitu pendekatan dan teknik-teknik melibatkan masyarakat dalam proses-proses pemikiran yang berlangsung selama kegiatan-kegiatan perencanaan dan pelaksanaannya serta pemantauan dan evaluasi program pembangunan masyarakat.
- 2) Metode Partisipasi Asesmen dan Rencana, metode ini terdiri dari 4 langkah yaitu: menemukan masalah, menemukan potensi, menganalisis masalah dan potensi, dan memilih solusi pemecahan masalah.
- 3) Metode Loka karya, metode ini efektif untuk memotivasi anggota peserta menyampaikan aspirasi dan kreativitas. Loka karya

bermanfaat untuk mengambil keputusan untuk sesuatu fokus permasalahan secara musyawarah dan ditemukan suatu konsensus.

- 4) Teknik Brainstorming, teknik ini dapat memotivasi untuk munculnya kreativitas anggota dalam memecahkan masalah atau persoalan yang dihadapi, dan teknik ini merupakan wujud dari “button up” hingga dapat memunculkan rasa memiliki dan rasa tanggung jawab.

Sehingga teknik pemberdayaan masyarakat petani (Febrianti, 2018) dalam penelitian ini yaitu:

- i. Pendidikan dan pelatihan yang diharapkan dapat meningkatkan keahlian dan keterampilan petani
- ii. Penyuluhan dan pendampingan dilakukan antara lain agar petani dapat melakukan:
 - 1) tata cara budi daya,
 - 2) pengolahan lahan
- iii. Pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian dapat dilakukan dengan memfasilitasi pengembangan pasar hasil Pertanian yang dapat dikelola oleh kelompok tani.

4. Prinsip Pemberdayaan Masyarakat

Ada empat prinsip yang sering digunakan dalam program pemberdayaan masyarakat, diantaranya yaitu:

a. Prinsip Kesetaraan

Adanya kesetaraan atau kesejajaran kedudukan antara masyarakat dengan lembaga yang melakukan program pemberdayaan masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan. Dinamika yang

dibangun yaitu hubungan kesetaraan dengan mengembangkan mekanisme berbagai pengetahuan, pengalaman dan keahlian satu sama lain. Masing-masing saling mengakui kelebihan dan kekurangan, sehingga terjadi proses saling belajar.

b. Partisipasi

Program pemberdayaan yang bisa menstimulasi kemandirian masyarakat adalah program yang bersifat partisipatif, direncanakan, dilaksanakan, diawasi, dan dievaluasi oleh masyarakat. Namun, untuk mencapai tingkat tersebut dibutuhkan waktu dan proses pendampingan yang melibatkan pendamping yang berkomitmen tinggi terhadap pemberdayaan masyarakat.

c. Keswadayaan atau kemandirian. Prinsip keswadayaan yaitu menghargai dan mengedepankan kemampuan masyarakat daripada bantuan pihak lain.

d. Berkelanjutan

Program pemberdayaan perlu dirancang berkelanjutan, meskipun pada awalnya peran pendamping lebih dominan dibanding masyarakat sendiri. Namun secara perlahan dan pasti, peran pendamping akan makin berkurang bahkan dihapus, karena masyarakat sudah mampu mengelola kegiatan sendiri.

5. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat

Tujuan dari pemberdayaan merupakan hal yang paling penting, berikut ini tujuan dari adanya pemberdayaan oleh Haida (dalam Tahrin et al., 2019) sebagai berikut:

- 1) Mengembangkan kemampuan masyarakat lapisan bawah dalam mengidentifikasi kebutuhan, mendapatkan sumber daya dalam memenuhi kebutuhan, dan memberdayakan mereka secara bersama – sama.
- 2) Membangun sebuah struktur masyarakat yang di dalamnya memfasilitasi tumbuhnya partisipasi secara demokratis ketika terjadipengambilan keputusan.
- 3) Memperkuat kekuasaan masyarakat khususnya kelompok lemah yang memiliki ketidakberdayaan, baik karena kondisi internal (persepsi mereka sendiri), maupun karena kondisi eksternal (ditindas oleh struktur sosial yang tidak adil).
- 4) Dicapainya kemampuan seseorang untuk memahami dan mengontrol kekuatan ekonomi dan sosial sehingga dapat memperbaiki keduanya. Dapat disimpulkan bahwa tujuan pemberdayaan masyarakat adalah untuk membuat masyarakat menjadi mandiri dan mampu mengembangkan kemampuan masyarakat dari ketidakberdayaan sehingga dapat mencapai kekuatan baik secara ekonomi maupun sosial.

c. Pemberdayaan Masyarakat Petani

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani pada pasal ayat 2 bahwa: “pemberdayaan petani adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan petani dalam melaksanakan usaha tani yang lebih baik melalui Pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penguatan kelembagaan petani”.

d. Kelompok Tani

Pada hakikatnya pengertian kelompok tani tidak bisa dilepaskan dari pengertian kelompok itu sendiri. Kelompok adalah sekumpulan orang yang mempunyai tujuan bersama yang berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama, mengenal satu sama lainnya, dan memandang mereka bagian dari kelompok tersebut. Menurut (Nazaruddin & Anwarudin, 2019) bahwa kelompok tani dapat menjadi wahana mobilisasi petani agar lebih terlibat dalam berbagai program karena keterlibatan dapat membangkitkan kesadaran mengenai pengetahuan, kemampuan dan sikapnya dalam membangun pertanian.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani pada pasal ayat 10 bahwa:

“kelompok tani adalah kumpulan petani/peternak/pekebun yang di bentuk atas dasar kesamaan kepentingan; kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, sumber daya; kesamaan komoditas; dan keakraban untuk meningkatkan serta mengembangkan usaha anggota”.

Menurut Mulyana (dalam Kasriani, 2019) kelompok pada dasarnya adalah gabungan dua orang atau lebih yang berinteraksi untuk mencapai tujuan bersama, dimana interaksi yang terjadi bersifat relatif tetap dan mempunyai struktur tertentu. Struktur merupakan sebuah kelompok adalah susunan dari pola antar hubungan interen yang mendekati stabil, yang terdiri atas: (1) suatu rangkaian status-status atau kedudukan-kedudukan para anggotanya yang hirarkis; (2) peranan-peranan sosial yang berkaitan dengan status-status itu; (3) unsur-unsur kebudayaan (nilai-nilai), norma-norma yang memepertahankan, membenarkan dan menanggungkan struktur.

Menurut Slamet (dalam Saleh, 2015) kelompok yaitu dua orang atau lebih yang Bersatu atas dasar kesamaan, berinteraksi melalui pola/struktur tertentu guna tercapai tujuan Bersama selama kurun waktu relatife Panjang.

Menurut (Mayasari & Nangameka, 2012) mengemukakan bahwa yang menjadi ciri-ciri suatu kelompok adalah: (1) ada interaksi antar anggota yang berlangsung secara anggota secara kontinu untuk waktu yang relatif lama; (2) setiap anggota menyadari bahwa ia merupakan bagian dari kelompok, dan sebaliknya kelompokpun mengakuinya sebagai anggota; (3) adanya kesepakatan bersama antar anggota mengenai norma-

norma yang berlaku, nilai-nilai yang dianut dan tujuan atau kepentingan yang akan dicapai; (4) adanya struktur dalam kelompok, dalam arti para anggota mengetahui adanya hubungan-hubungan antar peranan, norma tugas, hak dan kewajiban yang semuanya tumbuh didalam kelompok tersebut.

Menurut Mardikanto (dalam Astuti, 2010) memberi batasan bahwa kelompok tani adalah sekumpulan petani, yang terdiri dari petani dewasa pria dan wanita maupun petani taruna atau pemuda tani yang terikat secara informal dalam suatu wilayah kelompok atas dasar keserasian dan kebutuhan bersama serta berada di lingkungan pengaruh dan pimpinan kontak tani. Sedangkan Menurut Hermanto (dalam Kelbulan et al., 2018), menyebutkan bahwa kelompok tani adalah Lembaga petani yang langsung mengorganisir para petani dalam mengembangkan usaha taninya, yang nyata berfungsi sebagai bahan penyuluhan dan pergerakan kegiatan anggotanya, seperti kegiatan gotong royong, usaha simpan pinjam dan arisan kerja untuk usaha tani.

Menurut Mardikanto (dalam Kelbulan et al., 2018) kelompok tani adalah himpunan atau kesatuan yang hidup bersama sehingga terdapat hubungan timbal balik dan saling mempengaruhi serta memiliki kesadaran untuk saling tolong-menolong. Beberapa keuntungan dari pembentukan kelompok tani itu, antara lain sebagai berikut:

- a. Semakin eratnya interaksi dalam kelompok dan semakin terbinanya kepemimpinan kelompok.

- b. Semakin terarahnya peningkatan secara cepat tentang jiwa kerjasama antar petani.
- c. Semakin cepatnya proses difusi penerapan inovasi atau teknologi baru.
- d. Semakin naiknya kemampuan rata-rata pengembalian hutang petani.
- e. Semakin meningkatnya orientasi pasar, baik yang berkaitan dengan masukan (input) atau produk yang dihasilkannya.
- f. Semakin dapat membantu efesiensi pembagian air irigasi serta pengawasannya oleh petani sendiri.

Sedangkan alasan utama dibentuknya kelompok tani adalah :

1. Untuk memanfaatkan secara lebih baik (optimal) semua sumber daya yang tersedia.
2. Dikembangkan oleh pemerintah sebagai alat pembangunan.
3. Adanya alasan ideologis yang mewajibkan para petani untuk terikat oleh suatu.

C. Kerangka Pikir

Kerangka pikir dalam penelitian ini adalah bagaimana Pemberdayaan Kelompok Tani Oleh Dinas Pertanian Dan Balai Penyuluh Pertanian Perikanan dan Kehutanan Kecamatan Barru Dalam Meningkatkan Hasil Panen Padi di Dusun Camming, Desa Palakka, Kabupaten Barru. Untuk menganalisis pemberdayaan kelompok tani maka peneliti ini menggunakan 3 indikator dalam pemberdayaan masyarakat, Menurut (Fahrudin, 2012) dalam rangka untuk memberdayakan masyarakat dapat dilihat dari 3 aspek :

- a) *Enabling*, yaitu menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang.
- b) *Empowering*, yaitu meningkatkan kapasitas dengan memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat.
- c) *Protecting*, yaitu melindungi kepentingan dengan mengembangkan sistem perlindungan bagi masyarakat yang menjadi subjek pengembangan.

Bagan berikut ini, merupakan alur kerangka pikir yang akan mendeskripsikan secara runtut maksud dan tujuan penelitian ini dilakukan. Berikut:

Pemberdayaan Kelompok Tani Oleh Dinas Pertanian Dan Balai Penyuluh Pertanian Perikanan Dan Kehutanan Kecamatan Barru dalam Meningkatkan Hasil Panen Padi di Dusun Camming, Desa Palakka, Kabupaten Barru

Pemberdayaan Masyarakat

1. *Enabling*
2. *empowering*
3. *Protection*

(Fahrudin 2012)

Untuk meningkatkan hasil panen padi melalui program kelompok tani

Ganbar 1.0 Kerangka Pikir

D. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini berasal dari latar belakang masalah, kemudian di rumuskan dalam rumusan masalah dan dikaji berdasarkan teori dalam tinjauan pustaka. Adapun fokus penelitian yang berpijak dari indikator pemberdayaan masyarakat dari teori Fahrudin 2012 yaitu: "*Enabling, Empowering, Protecting*".

E. Deskripsi Fokus Penelitian

1. *Enabling* adalah pemerintah menciptakan suasana yang memungkinkan masyarakat desa dalam meningkatkan hasil panen padi yang ada di dusun camming, yang dimaksud dengan menciptakan suasana tersebut oleh pemerintah adalah memberikan atau mendukung dengan beberapa kebijakan masyarakat atau memfasilitasinya, misalnya dana bantuan dan alat-alat produksi pertanian, pupuk, hantraktor, pesticide dan pompanisasi.
2. *Empowering* yaitu meningkatkan kapasitas petani dengan memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat petani yang ada di dusun camming untuk itu pemerintah member pendidikan dan pelatihan (diklat) yang terkait dengan pekerjaan masyarakat tersebut, juga dengan penyuluhan-penyuluhan.
3. *Protecting* yaitu melindungi kepentingan masyarakat petani untuk bisa lebih bertahan dan berkembang. Dalam hal ini pemerintah memberikan kapasitas atau harga dan pemasaran hasil panen tersebut agar masyarakat yang ada di dusun camming bisa meningkatkan pendapatannya dengan bantuan perlindungan dari pemerintah.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan selama 2 bulan mulai 29 September 2020 s/d 29 November 2020. Penelitian ini dilaksanakan di kantor Balai Penyuluh Pertanian, Perikanan Dan Kehutanan Kecamatan Barru dan Kelompok Tani Pamarlete Dusun Camming. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemberdayaan kelompok tani oleh pemerintah dalam meningkatkan hasil panen padi.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai pemberdayaan pemerintah dalam Pemberdayaan Kelompok Tani Oleh Dinas Pertanian Dan Balai Penyuluh Pertanian Perikanan dan Kehutanan Kecamatan Barru Dalam Meningkatkan Hasil Panen Padi Di Dusun Camming, Desa Palakka, Kabupaten Barru.

2. Tipe penelitian

Tipe penelitian ini adalah fenomenologi dimaksudkan untuk memberi gambaran secara jelas mengenai masalah-masalah yang diteliti berdasarkan pengalaman yang dialami oleh informan yang berkaitan Pemberdayaan Kelompok Tani Oleh Dinas Pertanian Dan Balai Penyuluh

Pertanian Perikanan dan Kehutanan Kecamatan Barru Dalam Meningkatkan Hasil Panen Padi Di Dusun Camming, Desa Palakka, Kabupaten Barru.

C. Sumber Data

Sumber data penelitian menggunakan data primer dan data sekunder

1. Sumber data primer

Data primer yaitu data yang diperoleh dengan hasil observasi, wawancara, dokumen dan interaksi secara langsung dengan lingkungan tempat objek penelitian.

2. Sumber data sekunder

Data sekunder yaitu data yang diambil atau bersumber dari dokumen, laporan, artikel dan buku referensi yang bersangkutan dengan masalah yang akan diteliti.

D. Informan

Penentuan informan sebagai salah satu bentuk sumber data yang paling penting terhadap proses penelitian dan harus menggunakan Teknik yang tepat. Adapun Teknik yang di gunakan dalam penelitian kualitatif yaitu tehnik *purposive sampling*, *purposive sampling* menurut sugiyono (2013:126) yaitu salah satu Teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Dimana pertimbangan tertentu yang di maksud adalah orang yang di anggap paling tahu tentang masalah yang akan diteliti.

Informan penelitian

Tabel 1.0

NAMA	JABATAN	INISIAL
Achamad baso, S.ST	Kepala kantor BP3K kec.Barru	AB
Muldin, S.Pt	Penyuluh pertanian Desa palakka	MN
Bahtiar, S.Pd	Kepala desa palakka dan Ketua kelompok pamarlete III	BR
Kasman	Ketua kelompok pamarlete II	KN
Hasanuddin, S.Pd	Ketua kelompok tani I	HN
Hamsah, S.Pd	Bendahara pamarlete I	HS
Haping	Anggota pamarlete II	HG
Rusni	Anggota pamarlete III	RN

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Studi lapangan (*field research*)

Studi lapangan ini dimaksudkan yaitu penulis langsung melakukan penelitian pada lokasi atau obyek yang telah ditentukan. Studi lapangan yang dimaksudkan dalam skripsi ini yaitu penelitian yang dilakukan kepada kepala desa dan ketua ketua kelompok tani. Studi lapangan ditempuh dengan cara sebagai observasi dan wawancara terhadap para informan. Wawancara dimaksudkan yaitu peneliti melakukan wawancara secara langsung kepada informan yang dianggap memahami dan pelakon

yang termaktub dalam tema penelitian ini.

2. Studi Pustaka (*library research*)

Dalam studi pustaka ini penulis menelaah berbagai bahan bacaan/pustaka berupa buku-buku, media *online*, surat kabar, undang-undang, peraturan pemerintah serta dokumen-dokumen lainnya yang relevan dengan masalah yang di teliti.

F. Teknik Analisis Data

Menurut (Sugiyono, 2013) analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara otomatis data yang telah diperoleh dari hasil wawancara terhadap informan dan juga adanya dokumentasi dilapangan tempat penelitian. Deskripsi data yang digunakan yaitu menyusun dan mengelompokkan data menjadi 2 (dua) sehingga bisa memberikan gambaran daya nyata. Analisis yang dilakukan atas dasar data yang sebelumnya telah ditemukan karena mengingat bahwa penelitian kualitatif itu menolak pra konsep sebelum terjun ke lapangan tempat penelitian. Adapun analisis data yang digunakan melalui 3 (tiga) tahap yaitu :

1) Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pengumpulan data penelitian, peneliti dapat menemukan kapan saja waktu untuk mendapatkan banyak data di lapangan, peneliti juga bisa menerapkan metode wawancara, observasi atau berbagai dokumen yang berkaitan dengan Pemberdayaan Kelompok Tani Oleh Dinas Pertanian Dan BP3K Dalam Meningkatkan Hasil Panen Padi Di Dusun Camming, Desa Palakka, Kabupaten Barru.

2) Penyajian Data

Data yang telah direduksi sebelumnya, kemudian bisa disajikan dalam bentuk deskripsi berdasarkan aspek-aspek yang ada dalam penelitian. Biasanya di dalam penelitian ada banyak data yang didapatkan peneliti tetapi tidak semua data yang didapatkan dipaparkan. Karena akan memakan banyak waktu maka dari itu dapat dilakukan simpulan sehingga data yang diperoleh bisa dijelaskan secara singkat dan jelas.

3) Verifikasi Data dan Penarikan Kesimpulan

Langkah terakhir dalam penelitian kualitatif adalah yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang telah disimpulkan sebelumnya masih berubah kapan saja karena masih bersifat sementara akan tetapi jika sudah ada bukti yang mendukung dan benar-benar valid dan konsisten maka kesimpulan yang sebelumnya bisa di percaya.

Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian mungkin bisa menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan sejak awal, tetapi bisa jadi juga tidak karena telah dijelaskan sebelumnya bahwa masalah dan rumusan masalah bisa berubah dalam penelitian kualitatif ini masih bersifat sementara dan bisa berkembang setelah penelitian sudah berada di lapangan.

G. Keabsahan Data

Salah satu cara yang paling penting dan mudah untuk menguji keabsahan data dalam penelitian ini adalah dengan melakukan triangulasi. Menurut (Sugiyono, 2013) triangulasi adalah pengecekan data dari berbagai

sumber dengan berbagai cara dan waktu. Terdapat 3 (tiga) triangulasi menurut Sugiyono yaitu sebagai berikut :

1) Triangulasi Sumber Data

Triangulasi sumber data yaitu untuk menguji kredibilitas terhadap data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber yang berbeda. Misalnya, membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara, membandingkan antara apa yang dikatakan umum dan yang dikatakan secara pribadi dan membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang ada.

2) Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas terhadap data yang dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan waktu yang berbeda. Misalnya, data yang diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi, dokumentasi, atau kuesioner. Bila dengan teknik pengujian kredibilitas data tersebut, menghasilkan data yang berbeda-beda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau yang lain, untuk memastikan data mana yang dianggap benar atau mungkin semuanya benar karena sudut pandangnya berbeda-beda.

3) Traingulasi Waktu

Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data, untuk itu dalam rangka pengujian kredibilitas data maka dapat dilakukan dengan cara melakukan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang

berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga ditemukan kepastian datanya.



BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Pada bab IV ini peneliti akan memaparkan hasil penelitian yang dilakukan di BP3K Kecamatan Barru terkait dengan pemberdayaan masyarakat petani dalam meningkatkan hasil panen padi melalui program kelompok tani pamarlete Dusun Camming Desa Palakka Kabupaten Barru. Hasil penelitian menggambarkan mulai dari profil Kabupaten Barru dan Kantor BP3K barru.

Pada bab IV ini juga akan menyajikan mengenai visi dan misi kelompok tani pamarlete, Serta bagaimana peran penyuluh pertanian pada kelompok tani dalam memberdayakan masyarakat petani untuk meningkatkan hasil panen padi melalui program kelompok tani pamarlete Dusun Camming Desa Palakka Kabupaten Barru.

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Profil Kabupaten Barru

a. Sejarah Kabupaten Barru

Kabupaten Barru (Bugis) adalah salah satu Daerah Tingkat II di Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Ibu Kota Kabupaten ini terletak di Kota Barru. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 1.174,72 km² dan berpenduduk sebanyak 174.323 jiwa (2019).

b. Kelahiran Kabupaten Barru

Seiring dengan perjalanan waktu, maka pada tanggal 20 Februari 1960 merupakan tonggak sejarah yang menandai awal kelahiran Kabupaten Daerah Tingkat II Barru dengan ibu kota Barru, berdasarkan

Undang-Undang Nomor 229 tahun 1959 tentang pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi Selatan. Kabupaten Barru terbagi dalam 7 Kecamatan yang memiliki 40 Desa dan 14 Kelurahan, berada $\pm$ 102 Km di sebelah Utara Kota Makassar, ibu kota Sulawesi Selatan. Sebelum dibentuk sebagai suatu Daerah Otonom berdasarkan UU No. 29 Tahun 1959, pada tahun 1961 daerah ini terdiri dari 4 wilayah Swapraja di dalam kewedanaan Barru, Kabupaten Parepare lama, masing-masing Swapraja Barru, Swapraja Tanete, Swapraja Soppeng Riaja dan bekas Swapraja Mallusetasi. Ibu kota Kabupaten Barru sekarang bertempat di bekas ibu kota Kewedanaan Barru.

c. Keadaan Geografis Kabupaten Barru

Kabupaten Barru adalah salah satu Kabupaten yang terletak dipesisir pantai Barat Provinsi Sulawesi Selatan dengan panjang garis pantainya 78 km. Secara geografis terletak diantara koordinat $4^{\circ}05'35''$ - $4^{\circ}47'35''$ Lintang Selatan dan $119^{\circ}35'00''$ - $119^{\circ}49'16''$ Bujur Timur dengan luas wilayah $1.174,72 \text{ km}^2$ (117.472 Ha) dan berada $\pm$ 102 km disebelah utara Kota Makassar Ibukota Provinsi Sulawesi Selatan yang dapat ditempuh melalui perjalanan darat $\pm$ 2,5 jam. Kabupaten Barru berada diantara Kota Makassar dan Kota Pare-pare dan merupakan jalur perlintasan trans sulawesi.

Kabupaten Barru secara administratif terbagi atas 7 Kecamatan yaitu Kecamatan Tanete Riaja, Kecamatan Tanete Rilau, Kecamatan Barru (Ibukota Kabupaten), Kecamatan Soppeng Riaja, Kecamatan

Mallusetasi, Kecamatan Pujananting dan Kecamatan Balusu dan terdiri dari 15 Kelurahan dan 40 Desa.

Kabupaten Barru terletak pada jalan Trans Sulawesi dan merupakan daerah lintas provinsi yang terletak antara kota Makassar dan kota Pare-pare. Secara administratif kecamatan yang ada di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1 Luas Daerah dan Pembagian Wilayah Administratif Kabupaten Barru

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Luas	
			Km ²	%
1.	Tanete Riaja	7	174,29	14,84
2.	Tanete Rilau	10	79,17	6,74
3.	Barru	10	199,32	16,97
4.	Soppeng Riaja	7	78,90	6,71
5.	Mallusetasi	8	216,58	18,44
6.	Pujananting	7	314,26	26,75
7.	Balusu	6	112,20	9,55
Total		55	1.174,72	100%

Sumber: Data diolah, 2020.

d. Keadaan Demografis Kabupaten Barru

Jumlah Penduduk di Kabupaten Barru 174.323 jiwa (2019), yaitu persentase penduduk menurut jenis kelamin Jumlah Penduduk laki-laki 98,95 dan penduduk perempuan 97,24. Dan jumlah penduduk di Kabupaten Barru 173.623 jiwa (2018), yaitu Jumlah penduduk laki-laki 90.134 jiwa dan penduduk perempuan 83.489 jiwa. Untuk lebih jelasnya

keadaan penduduk di Kabupaten barru dapat dilihat dibawah ini :

e. Visi dan Misi Kabupaten Barru

Adapun Visi Kabupaten Barru Tahun 2016-2021 adalah Terwujudnya Kabupaten Barru lebih Maju, Sejahtera, Taat Azas, dan Bermartabat yang bernaftaskan Keagamaan. Sedangkan Misi yang akan dilakukan dalam rangka mencapai perwujudan visi tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat
- b) Meningkatkan kecerdasan dan profesionalisme SDM
- c) Mengembangkan interkoneksi sinergis antar wilayah di tingkat nasional, regional dan internasional
- d) Menciptakan lingkungan yang kondusif
- e) Mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*)

Misi disusun dalam rangka mengimplementasikan Langkah langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi yang telah dipaparkan di atas. Rumusan misi merupakan penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Rumusan misi disusun untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi.

Rumusan misi disusun dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik eksternal dan internal yang mempengaruhi serta kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada dalam

pembangunan daerah. Misi disusun untuk memperjelas jalan atau langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai perwujudan visi. Dengan gambaran misi yang demikian, tim menelaah misi kepala daerah dan makna serta implikasinya bagi perencanaan pembangunan, lalu menerjemahkannya ke dalam pernyataan misi sesuai kriteria pernyataan misi sebagaimana telah dijelaskan di atas.

2. Profil kantor BP3K Kec. Barru

Balai penyuluh pertanian perikanan dan perkebunan (BP3K) kecamatan barru di bentuk pada tahun 1990 yang di bawahi oleh dinas petanian kabupaten barru dengan wilayah kerja meliputi 11 wilayah se-kecamatan barru. Letak wilayah BP3K kecamatan barru berada pada $119^{\circ}38'30''$ BT dan $4^{\circ}24'36''$ LS.

Kantor Pelaksana penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan adalah salah satu lembaga teknis daerah sebagai unsur pendukung tugas Bupati yang mempunyai tugas melaksanakan kebijakan daerah yang bersifat spesifik. Yang dipimpin oleh seorang Kepala Kantor, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kantor Pelaksana Penyuluhan Pertanian mempunyai tugas pokok:

- a. Memberikan dukungan kepada Bupati dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah bidang penyuluhan yang sejalan dengan kebijakan dan program penyuluhan provinsi dan nasional;
- b. Melaksanakan penyuluhan dan mengembangkan mekanisme, tata kerja, dan metode penyuluhan;

- c. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, pengemasan, dan penyebaran materi penyuluhan kepada masyarakat dan pelaku usaha;
- d. Melaksanakan pembinaan pengembangan kerja sama, kemitraan, pengelolaan kelembagaan, ketenagaan, sarana dan prasarana, serta pembiayaan penyuluhan;
- e. Menumbuh kembangkan dan memfasilitasi kelembagaan dan forum kegiatan bagi masyarakat dan pelaku usaha;
- f. Melaksanakan peningkatan kapasitas penyuluh melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan; dan
- g. Melakukan proses pembelajaran melalui percontohan dan pengembangan model usaha bagi pelaku utama dan usaha tani.

Kantor Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pelaksana penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang pelaksanaan penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
- c. Pembinaan pelaksanaan tugas dibidang penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.
- d. Pelaksanaan urusan tata usaha Kantor;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Kantor Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, terdiri dari: Kepala kantor, Sub bagian Tata usaha, Seksi Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, Seksi Ketenagaan, Sarana dan Prasarana Penyuluhan, Seksi Kelembagaan dan Kerjasama, Kelompok Jabatan Fungsional. Balai Penyuluhan dibentuk di kecamatan baru untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang

(1) Balai Penyuluh itu sendiri mempunyai tugas tersendiri yakni :

- a. Menyusun program penyuluhan pada tingkat kecamatan sejalan dengan program penyuluhan kabupaten;
- b. Melaksanakan penyuluhan berdasarkan program penyuluhan;
- c. Menyediakan dan menyebarkan informasi teknologi, sarana produksi, pembiayaan dan pasar;
- d. Memfasilitasi pengembangan kelembagaan dan kemitraan pelaku utama dan pelaku usaha,
- e. Memfasilitasi peningkatan kapasitas penyuluh pns, penyuluh swadaya dan penyuluh swasta melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan; dan
- f. Melakukan proses pembelajaran melalui percontohan dan pengembangan model usaha tani bagi pelaku utama dan pelaku usaha.

(2) Balai Penyuluh berfungsi sebagai tempat pertemuan para penyuluh, pelaku utama, dan pelaku usaha.

- (3) Balai Penyuluh bertanggung jawab kepada Kantor Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yang pembentukannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Tabel 1.2 Balai Penyuluh Pertanian (BPP) Kec. Barru

Nama	Pangkat /Gol	Jabatan
Achmad Baso, S.ST	Pembina/IV.a	Koord. Peny. Pert. Kec. Barru
Muldin, S.Pt	Penata Tk I / VI.a	PPL Desa Palakka
Suriani, S.ST	Penata Muda Tk I/III.b	PPL Kel Tuwung
A.Nur Asmawati, S.TP	Penata / III.c	PPL Desa Siawung
Artati Latif, SP	Penata Muda / III.a	PPL Kel Coppo Kel Sumpang Binangae
Hamisah, SP	Penata / III.c	PPL Kel Sepee
Kasmin, S.Pt	Pengatur / II.c	PPL Desa Anabanua
Yasir Harun, SP	Penata Muda Tk I / III.b	PPL Desa Galung dan Tompo
Muhaemin Umar, S.ST	Penata Muda / III.a	PPL Kel Tuwung
Ahmad	-	Penyuluh Pertanian Desa Galung
Taufiq SP	-	Penyuluh Pertanian Kel Mangempang

Sumber: Data diolah, 2020.

3. Profil Kelompok Tani Pamarlete

Latar belakang berdirinya Kelompok Tani pamarlete karena adanya kesamaan tujuan para petani dalam meningkatkan hasil panen padi para petani dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kemudian sebagai tempat berkumpul dan memecahkan masalah dengan para petani, bisa berorganisasi, serta sebagai wadah belajar bersama atau wadah untuk produksi. Kelompok Tani pamarlete terbagi menjadi 2 kelompok pada tahun 2000 yang terbentuk di Dusun Camming, sedangkan kelompok tani

paralete 3 terbentuk pada tahun 2013 sehingga kelompok tani paralete terbagi menjadi 3 kelompok yang telah mengalami pasang surut dalam menjalankan sebuah organisasi kelompok untuk kepentingan bersama para petani.

1. Kelompok Tani Pamarlete I

Kelompok tani paralete I Terbentuk Pada Tahun 2000 dimana, struktur kelompok tani paralete I terdiri dari 1 ketua kelompok tani (KN), Sekertaris (HNS), Bendahara (JL).

a. Luas Lahan Kelompok Tani Pamarlete I

Luas lahan yang digarap oleh anggota Kelompok Tani paralete I sekitar 62 ha dengan jumlah 40 anggota. Petani yang tergabung di Kelompok Tani paralete I yaitu petani pemilik dan petani penggarap.

b. Ketersediaan Saprodi

Sarana dan Produksi merupakan fasilitas yang digunakan petani untuk membantu proses pengolahan tanaman dalam usahatani. Berikut sarana produksi yang disediakan oleh Kelompok Tani paralete I yaitu: Benih, Pupuk, dan Pestisida. Kelompok Tani paralete I juga memiliki alat-alat yang dapat digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan kelompok, antara lain: mesin traktor, mesin panen padi, mesin tanam padi, dan timbangan padi, alat pengemasan, dll.

c. Program-program Kelompok Tani Pamarlete I

Program-program yang dilakukan oleh Kelompok Tani Pamarlete I yaitu :

Program pengembangan perbenihan, penggunaan bibit varietas unggul dan bermutu, penerapan pola tanam (legowo/ SRI), Penerapan penggunaan pupuk berimbang.

2. Kelompok Tani Pamarlete II

Kelompok tani pamarlete II Terbentuk Pada Tahun 2000 dimana, struktur kelompok tani pamarlete II terdiri : Ketua kelompok tani (HN), Sekretaris (DN), Bendahara (HS).

a. Luas Lahan Kelompok Tani Pamarlete II

Luas lahan yang digarap oleh anggota Kelompok Tani pamarlete II sekitar 40 ha dengan jumlah 35 anggota. Petani yang tergabung di Kelompok Tani pamarlete II

b. Ketersediaan Saprodi

Sarana dan Produksi merupakan fasilitas yang digunakan petani untuk membantu proses pengolahan tanaman dalam usahatani.

Berikut sarana produksi yang disediakan oleh Kelompok Tani pamarlete II yaitu: Benih, Pupuk, dan Pestisida. Kelompok Tani

pamarlete II juga memiliki alat-alat yang dapat digunakan untuk

mendukung pelaksanaan kegiatan kelompok, antara lain: mesin

traktor, mesin panen padi, mesin tanam padi, dan timbangan padi,

alat pengemasan, dll.

c. Program-program Kelompok Tani Pamrlete II

Program-program yang dilakukan oleh Kelompok Tani Pamarlete II yaitu :

Penanaman padi dan palawija, pertanian penanaman padi penangkar.

3. Kelompok Tani Pamarlete III

Kelompok tani pamarlete III Terbentuk Pada Tahun 2013 dimana, struktur kelompok tani pamarlete III terdiri : ketua kelompok tani (BT), Sekretaris (BN), Bendahara (RN).

a. Luas Lahan Kelompok Tani Pamarlete III

Luas lahan yang digarap oleh anggota Kelompok Tani pamarlete III sekitar 62 ha dengan jumlah 58 anggota. Petani yang tergabung di Kelompok Tani pamarlete III

b. Ketersediaan Sapropdi

Sarana dan Produksi merupakan fasilitas yang digunakan petani untuk membantu proses pengolahan tanaman dalam usahatani. Berikut sarana produksi yang disediakan oleh Kelompok Tani pamarlete II yaitu: Benih, Pupuk, dan Pestisida. Kelompok Tani pamarlete II juga memiliki alat-alat yang dapat digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan kelompok, antara lain: mesin traktor, mesin panen padi, mesin tanam padi, dan timbangan padi, alat pengemasan, dll.

c. Program-program Kelompok Tani Pamrlete III

Program-program yang dilakukan oleh Kelompok Tani Pamarlete III yaitu :

Menurut ketua kelompok tani pamarlete 3 , tidak ada program mandiri yang ada hanya Program di laksanakan oleh pemerintah desa

Dalam rangka peningkatan peningkatkan hasil panen padi yang dulunya

1. pembajakan sawah diolah dengan ternak seperti sapi,kuda,kerbau, tapi seiring dengan berjalannya waktu dan teknologi semakin canggih seperti alat traktor, selain dapat memudahkan untuk pengolahan lahan pertanian juga untuk meminimalisir tenaga yang terkuras.

2. Alat perontok padi yang awalnya memakai tenaga manusia yang hasil panen padi tergantung seberapa banyak yang bisa di kerjakan, tetapi dalam rangka meningkatkan hasil panen dengan seiring berjalannya waktu mengadakan kombaiyen mobil, karena dengan adanya kombaiyen mobil hasil panen padi bersih dan meningkat

3. Memilih bibit unggul agar dapat meningkatkan hasil panen padi

Yang mendukung pertanian Dalam meningkatkan hasil panen

padi yang harus di lakukan yaitu :

1. Harus ada pelatihan dari ppl ke kelompok tani
2. Pemilihan bibit unggul setiap tahun

3. Mengadakan pupuk berimbang sesuai anjuran pemerintah
4. Mengadakan pompa air dengan bantuan perpipaan dari pemerintah untuk melaksanakan musim tanam 2 kali menggunakan sebagian lahan yang telah di Kelola oleh kelompok tani pamarlete III .

B. Hasil Pembahasan

Pelaksanaan Pemberdayaan Kelompok Tani Oleh Dinas Pertanian Dan BP3K Dalam Meningkatkan Hasil Panen Padi Di Dusun Camming, Desa Palakka, Kabupaten Barru Sudah berjalan cukup baik, karena baik dari sisi *enabling* yaitu pemerintah sudah memberdayakan masyarakat dengan pemberian bantuan sebagai fasilitator bagi petani walaupun berdasarkan pandangan masyarakat belum memadai, dan dari segi *empowering* yaitu meningkatkan kapasitas petani oleh pemerintah dengan melaksanakan pemberdayaan masyarakat melalui Pendidikan dan pelatihan sudah cukup baik karena sudah sesuai dengan kebutuhan kelompok tani, penyuluhan dan pendampingan belum terlaksana dengan baik, karena cara penginformasian kepada masyarakat belum maksimal. Sedangkan dari sisi *protecting* yaitu perlindungan dan perkembangan sarana pemasaran hasil pertanian dan sarana prasarana pertanian juga belum memadai sedangkan kebutuhan sarana penting disampaikan kepada Badan penyuluh pertanian karena sarana adalah pendukung dalam kegiatan usaha badan penyuluh pertanian pada kenyataanya program yang dilaksanakan oleh kelompok tani pamarlete Dusun camming sudah sesuai dengan yang dibutuhkan masyarakat dalam meningkatkan hasil

panen padi di Dusun camming Desa palakka kabupaten barru, tinggal bagaimana masyarakat dan penyuluh bisa bekerjasama dengan lebih baik lagi agar semuanya berjalan dengan baik. Namun dalam hal kebutuhan masyarakat petani terutama anggota kelompok tani sudah terpenuhi dengan adanya bantuan dari petugas PPL (Penyuluh pertanian Lapangan) serta dinas pertanian dan pihak pihak yang telah membantu dalam pelaksanaan program kelompok tani pamarlete Dusun Camming Desa Palakka Kabupaten Barru.

Adapun penjelasan dari beberapa indikator terkait pemberdayaan masyarakat oleh pemerintah melalui program kelompok tani dan kinerja Penyuluh pertanian lapangan (PPL) Sebagai berikut :

1. *Enabling*

Pemberdayaan masyarakat dalam hal ini pemerintah menciptakan suasana yang memungkinkan pelaksanaan kegiatan kelompok tani dalam meningkatkan hasil panen mereka dengan cara memberikan atau mendukung kelompok tani dengan beberapa kebijakan atau memfasilitasi yang dapat mendorong masyarakat untuk membangkitkan kesadaran masyarakat akan pentingnya potensi yang dimiliki. Pemerintah melakukan upaya yang ditujukan kepada masyarakat melalui penyuluhan dalam bentuk teknologi tertentu yang telah ditetapkan oleh pemerintah, yang dapat meningkatkan kualitas panen masyarakat .

Berikut wawancara penulis dengan ketua Bp3k Kec Barru, terkait pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan panen masyarakat . Sebagai berikut :

“Pemerintah termasuk penyuluh pertanian yang memberdayakan kelompok tani meningkatkan hasil panen masyarakat dengan memberikan dukungan atau memfasilitasi kelompok tani, misalnya bantuan alat alat produksi pertanian”. (Wawancara dengan AB, pada tanggal 28 september 2020).

Hasil wawancara dikemukakan bahwa pemerintah dalam hal ini BP3K (Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan) yang berkoordinasi langsung dengan kelompok tani yang ada di Dusun Camming Desa Palakka terkait pemberdayaan kelompok tani dalam meningkatkan hasil panen mereka, hal ini akan sangat berpengaruh terhadap hasil produksi dimana setelah adanya bantuan dari pemerintah seperti alat alat pertanian serta akan dapat akan dapat meningkatkan semangat masyarakat dan mempermudah pengelolaan lahan sampai pengelolaan hasil pertanian juga dapat meningkatkan hasil produksi serta melakukan pemeliharaan tanaman yang lebih baik.

Kelompok tani merupakan bentuk kerjasama yang tepat untuk kegiatan yang melibatkan penggunaan alat dan mesin pertanian, kerjasama pengolahan dan pemasaran hasil dan penguatan modal kerja. Pengolahan dan pemasaran hasil pertanian hanya dapat dilakukan apabila petani dalam kelompok tersebut terlibat dalam penggunaan teknologi. Hal ini mengindikasikan bahwa kelompok tani efektif dimanfaatkan untuk alih teknologi.

Tabel 1.3 Beberapa sarana dan prasarana pokok dan penunjang yang dimiliki Oleh kelompok tani se-desa Palakka, berdasarkan hasil pemantauan sebagai berikut :

NO.	URAIAN	JUMLAH UNIT
I.	SARANA DAN PRASARANA PERTANIAN	
•	Traktor Tangan	161
•	Hand Sprayer	350
•	Penggilingan Padi	6
•	Mesin Paut	6
•	Pompa Air	10
•	Alat Pengusap Jagung	3
•	Pabrik Kopi	5
II.	JALAN DAN JEMBATAN	
•	Jembatan	3
•	Jalan Kabupaten	1 Km
•	Jalan Desa	3
•	Jalan Usaha Tani	8
III.	ALAT ANGKUT	
•	Mobil Dinas	1
•	Mikrolet	19
•	Kuda	125

Berikut wawancara penulis dengan ketua kelompok tani pamarlete

III, terkait tujuan dibentuknya kelompok tani pamarlete , sebagai berikut:

“ Kelompok tani adalah penunjang aspirasi masyarakat yang dapat meningkatkan pengetahuan akan teknologi dan kemampuan masyarakat petani mulai dari tahap persiapan sampai pada tahap pemasaran hasil pertanian serta bantuan dari pemerintah untuk meningkatkan hasil panen masyarakat petani” (Wawancara dengan BR, pada 04 oktober 2020).

Berdasarkan table diatas dapat di jelaskan bahwa dengan adanya kelompok tani yang dapat menunjang aspirasi masyarakat dimana pada zaman dahulu orang membajak sawah dengan sapi tapi seiring berjalannya waktu dan teknologi semakin canggih sehingga pemerintah memberikan bantuan kepada masyarakat tani melalui proposal dari kelompok tani yang ada di desa, namun Keberhasilan dari subsector pertanian seharusnya didukung oleh sarana dan prasarana pertanian yang cukup memadai dari tahap persiapan sampai pada tahap pemasaran hasil tapi karena segala keterbatasan yang ada belum dapat dipenuhi/dimiliki oleh petani maupun kelompok tani, yang ada jembatan serta sarana transportasi dan informasi untuk menunjang mobilitas kegiatan usaha tani masih sangat terbatas.

Pada umumnya pengaruh penggunaan teknologi baru terhadap peningkatan produktivitas tidak diragukan lagi seperti produktivitas meningkat dengan pesatnya adopsi benih unggul oleh (Nuryanti & Swastika, 2011).

Berbagai teknologi pertanian seperti: pengaturan waktu tanam, pergiliran jenis tanaman dan varietas, tata air, pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT), konservasi tanah dan air dan sebagainya

hanya efektif diterapkan jika dilakukan Bersama-sama oleh anggota kelompok kelompok tani. Karena jika dilakukan oleh petani individual tanpa ada usaha untuk menyatu dengan petani lain, tidak akan memberikan hasil yang diharapkan. Oleh (Nuryanti & Swastika, 2011).

Berikut hasil wawancara penulis dengan bendahara kelompok tani pamarlete II terkait, kebutuhan sarana masyarakat petani sebagai berikut :

“Penerapan teknologi pada pertanian yang belum maksimal terkadang bukan disebabkan karena teknologi yang belum dikuasai, tapi terkadang dipengaruhi oleh sarana dan prasarana yang dimiliki kurang memadai. Maka dari itu membutuhkan bantuan langsung dari pemerintah karena petani individu belum mampu membeli traktor dengan sendiri” (Wawancara dengan HS, pada 04 oktober 2020).

Sama halnya yang dikemukakan oleh kepala BP3K mengatakan bahwa

“Kebutuhan sarana memang penting disampaikan kepada badan penyuluh pertanian karna sarana adalah pendukung dalam kegiatan usaha badan penyuluh pertanian, tetapi tidak menutup kemungkinan kalau petani sudah bisa secara swadaya membeli traktor, pompa dll, tetapi tidak semua petani mampu, lebih banyak yang masih membutuhkan bantuan dari pemerintah dan selalu membutuhkan pengawalan untuk kebutuhan para petani” (Wawancara dengan AB, pada 28 september, 2020).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat di jelaskan bahwa penerapan teknologi pada pertanian belum maksimal bukan karena penguasaan teknologi tetapi terdapat pada sarana dan prasarana yang belum memadai. Kebutuhan sarana penting disampaikan kepada Badan penyuluh pertanian karena sarana adalah pendukung dalam kegiatan usaha badan penyuluh pertanian, tetapi pada kenyataanya masyarakat petani belum semuanya mampu secara swadaya membeli traktor, pompa dll, lebih banyak yang masih membutuhkan bantuan dari pemerintah dan

selalu membutuhkan pengawalan dalam hal yang berkaitan dengan pertanian.

Tahap penyadaran dan pembentukan perilaku menuju perilaku sadar dan peduli sehingga merasa membutuhkan peningkatan kapasitas diri, dengan tahap ini pihak pemerintah selaku pemberdaya berusaha dalam menciptakan suatu kondisi agar dapat memfasilitasi berlangsungnya proses pemberdayaan yang efektif.

Berikut wawancara penulis dengan ketua kelompok tani pamarlete II, terkait pemberdayaan masyarakat petani melalui tahap penyadaran dalam peningkatan kapasitas diri, sebagai berikut:

“Pemberdayaan masyarakat petani di Dusun Camming Desa palakka belum cukup maksimal walaupun Bp3k sudah melakukan berbagai cara agar dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kegiatan kegiatan dari pemerintah agar mereka bisa meningkatkan kapasitas diri mereka, namun masih saja ada yang belum sadar akan hal tersebut”. (Wawancara dengan KN, pada 30 September, 2020).

Hasil wawancara dengan seorang informan, ketua kelompok tani pamarlete II menjelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat yang ada di Dusun camming yang dilakukan oleh BP3K belum cukup maksimal baik dari pemerintah dan masyarakat karena masyarakatnya belum semuanya sadar akan hal penting yang dapat mensejahterakan hidupnya karena pertanian yang mereka lakukan akan lebih maksimal jika sesuai dengan prosedur dari pemerintah maka dapat meningkatkan taraf hidup, namun terkadang masih ada yang acuh terhadap maksud pemerintah dengan memberikan arahan kepada masyarakat agar dapat mengikuti intruksi dari

pemerintah demi meningkatkan kapasitas diri masyarakat khususnya kelompok tani yang ada di dusun camming, sedangkan dari pemerintah sendiri menurut masyarakat alat alat pertanian belum memadai, maka dari di perlukan koordinasi yang baik dari pemerintah dan masyarakat yang ada di dusun camming.

Berarti bimbingan atau pertolongan yang diberikan secara sengaja oleh orang dewasa agar menjadi dewasa. Selanjutnya, pendidikan diartikan sebagai usaha yang dijalankan oleh seseorang atau kelompok orang lain agar menjadi dewasa atau mencapai tingkat hidup atau penghidupan yang lebih tinggi dalam arti mental.

Berdasarkan hasil observasi peneliti dilapangan menunjukkan bahwa pada saat melakukan penelitian di Dusun Camming Desa Palakka sudah ada alat-alat yang telah dibagikan kepada petani di Dusun Camming oleh Dinas Pertanian dan Balai Penyuluh Pertanian Perikanan dan Kehutanan kecamatan Barru, namun menurut masyarakat alat yang telah dibagikan kepada petani belum memadai karena petani belum mampu secara swadaya membeli alat alat pertanian, seperti traktor, pompa dll.

2. *empowering*

Pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh Pemerintah sesuai dengan kewenangannya yaitu meningkatkan kapasitas kelompok tani yang ada di dusun camming dengan memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat petani di dusun camming sebagai daerah yang kaya akan kekayaan alam, khususnya di sektor pertanian. untuk itu

pemerintah dalam hal ini Dinas pertanian kabupaten barru dan Balai penyuluh kecamatan barru memberi Pendidikan dan pelatihan, serta penyuluhan dan pendampingan kepada kelompok tani yang ada di dusun camming. Adapun beberapa penjelasan dari pemberdayaan pemerintah untuk meningkatkan kapasitas kelompok tani di dusun camming, dan hasil wawancara dengan beberapa informan:

1. Pendidikan Dan Pelatihan

Pemberdayaan masyarakat dalam hal ini pemerintah yang melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan Pendidikan dan pelatihan, masih butuh peningkatan dalam hal pengembangan Pendidikan dan pelatihan karena kurangnya sumber daya, namun pemerintah sudah melakukan peningkatan kapasitas dalam kegiatan Pendidikan dan pelatihan pemerintah melakukan upaya yang ditujukan kepada masyarakat melalui pembinaan kelompok tani agar dapat meningkatkan kualitas panen masyarakat.

Berikut wawancara penulis dengan ketua Bp3k Kec Barru, terkait pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan kapasitas pertanian. Sebagai berikut :

“ Pemerintah termasuk penyuluh pertanian yang memberdayakan masyarakat petani dalam peningkatan kapasitas penyuluh pertanian, dimana hal tersebut merupakan tujuan pemberdayaan seperti setiap tahunnya ikut dalam pelatihan, karena pelatihan dibutuhkan di kalangan kelompok tani maupun masyarakat petani dalam pengelolaan hasil pertanian” (Wawancara dengan AB, pada tanggal 28 september 2020).

Hasil wawancara dikemukakan bahwa pemerintah dalam hal ini BP3K (Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan) yang berkoordinasi langsung dengan kelompok tani yang ada di Dusun Camming Desa Palakka terkait pemberdayaan masyarakat petani dalam meningkatkan kapasitas penyuluh pertanian, hal ini akan sangat berpengaruh terhadap hasil produksi dimana setelah mengikuti pelatihan setiap tahunnya akan dapat meningkatkan hasil produksi karena masyarakat petani menjadi lebih mampu dalam menerapkan teknologi dengan serta melakukan pemeliharaan tanaman yang lebih baik.

Dalam arti sederhana pendidikan seringkali diartikan sebagai usaha manusia untuk membina sesuai dengan nilai-nilai di dalam masyarakat dan kebudayaannya. Dalam perkembangannya, istilah pendidikan atau *paedagogic*.

Berikut wawancara penulis dengan ketua kelompok tani pamarlete II, terkait pemberdayaan masyarakat petani melalui kinerja penyuluh pertanian sebagai berikut:

“Pemberdayaan masyarakat petani di Dusun Camming Desa palakka sudah baik karena mereka selalu mau belajar dan jika ada keluhan pihak kelompok tani langsung menghubungi penyuluh pertanian untuk di berikan arahan seperti halnya dalam pembasmi hama tanaman padi hal tersebut membutuhkan arahan dari balai penyuluh untuk meminimalisir adanya kekurangan hasil panen padi”. (Wawancara dengan KN, pada 30 September, 2020).

Hasil wawancara dengan seorang informan, ketua kelompok tani pamarlete II menjelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat yang ada di Dusun camming Sudah baik karena masyarakatnya mau belajar dan mengikuti arahan dengan baik dari balai penyuluh untuk di berikan informasi yang dapat meningkatkan hasil panen padi mereka serta dapat mencukupi kehidupan keluarganya.

Berarti bimbingan atau pertolongan yang diberikan secara sengaja oleh orang dewasa agar menjadi dewasa. Selanjutnya, pendidikan diartikan sebagai usaha yang dijalankan oleh seseorang atau kelompok orang lain agar menjadi dewasa atau mencapai tingkat hidup atau penghidupan yang lebih tinggi dalam arti mental.

Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.

Pengertian pelatihan adalah usaha yang terencana dari organisasi untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kemampuan pegawai dalam melakukan pekerjaan yang spesifik di masa yang akan datang.

Pelatihan menurut Sedarmayanti (dalam Anggita, 2017) menyatakan bahwa Dalam mengurangi dampak-dampak negative yang dikarenakan kurangnya pendidikan, pengalaman yang terbatas, dan anggota kelompok tertentu maka sebagai sarana yang ditunjukkan pada upaya dalam mengaktifkan kerja pada anggota organisasi yang kurang aktif sebelumnya,

Berikut wawancara penulis dengan PPL Desa palakka, terkait pelatihan pengelolaan hasil produksi dan penerapan teknologi sebagai berikut:

"Pelatihan di butuhkan pada kalangan kelompok tani atau masyarakat petani yang berkaitan dengan pengelolaan hasil produksi, pelatihan menerapkan teknologi tepat guna serta manfaat dari teknologi tersebut, pada saat memasuki musim panen, tidak jarang masyarakat susah dalam memasarkan hasil produksi pertaniannya karena hadirnya para tengkulak yang dapat mempengaruhi kehidupan petani" (Wawancara dengan MN, 28 september 2020)

Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa balai penyuluhan melakukan pelatihan dikalangan kelompok tani atau petani mandiri terkait pengelolaan hasil pertanian, pelatihan tata cara penggunaan alat pertanian, dan manfaat teknologi digital. Pengelolaan hasil pertanian tentu dibutuhkan agar saat memasuki musim panen para petani tidak mengalami kesulitan untuk memasarkan produk pertaniannya sebab adanya para tengkulak turut hadir yang menyebabkan kesulitan dalam kehidupan masyarakat petani, para tengkulak tersebut membeli produk pertanian langsung dari petani dengan harga murah dan menjual kembali dipasaran dengan harga

tinggi. Dengan hasil, keuntungan yang diperoleh para petani menurun. Dalam pelaksanaan pelatihan alat pertanian perlu adanya pendampingan dari pemerintah setempat serta melibatkan petani lainnya, diharapkan pelatihan peralatan pertanian dapat meningkatkan produksi hasil pertanian. Pelatihan petani bertujuan untuk memanfaatkan teknologi digital dan diharapkan mampu meningkatkan daya saing sektor pertanian terhadap sektor lainnya, seperti sektor industri.

Tingkat pendidikan petani baik pendidikan formal petani penting karena merupakan peningkatan sumberdaya manusia. Oleh Kasri (dalam Hamdani, 2020). Dengan pendidikan yang lebih tinggi petani akan cepat menerima teknologi baru sebagai proses difusi.

Status petani sangat menentukan alokasi sumberdaya, biasanya petani penyewa memperoleh kualitas lahan yang lebih rendah dibanding dengan petani pemilik. Gejala ini disebabkan oleh keadaan bahwa lahan yang akan disewakan kepada orang lain kualitasnya lebih rendah. Sedangkan lahan yang diolah sendiri mempunyai kualitas lahan yang lebih baik. Status petani nyata sangat berpengaruh terhadap produksi pertanian. Status petani sebagai penyewa produksi lebih rendah dibanding dengan petani yang berstatus pemilik, (Kuntariningsih & Mariyono, 2013).

Peningkatan produksi pertanian setelah adanya pelatihan antara lain disebabkan karena petani lebih efisien dalam alokasi input melalui

penerapan teknik bercocok tanam yang sehat, perbaikan cara budidaya lebih baik yaitu dengan menggunakan jarak tanam yang teratur, cara tanam yang lebih baik serta pengambilan keputusan dalam pengendalian hama dan penyakit. Dimana Perbaikan-perbaikan tersebut diperoleh petani setelah mengikuti pelatihan. Sehubungan dengan adanya pelatihan kepada petani untuk peningkatan produksi pertanian tersebut berdampak baik terhadap kinerja usahatani ditunjukkan oleh adanya peningkatan produksi dan keuntungan usahatani peningkatan produksi terjadi karena penggunaan input-input (sarana produksi) yang lebih produktif.

Peningkatan kualitas sumberdaya manusia adalah pendidikan formal dan pengalaman sebagai petani yang sangat berpengaruh terhadap produktivitas dan keuntungan usahatani.

Pelatihan pertanian khususnya untuk para kelompok tani dan petani mandiri lainnya memang membutuhkan dukungan dari berbagai pihak. Baik itu pemerintah, sektor swasta, para petani, dan masyarakat luas. Jika pelatihan berjalan dengan baik dengan dukungan berbagai pihak maka bisa dipastikan kecamatan baru akan menjadi salah satu daerah dengan manajemen pertanian terbaik di Sulawesi Selatan dimasa yang akan datang.

Pada tabel dibawah dapat menjelaskan bahwa pelatihan dan pendidikan dalam penyuluh pertanian lebih berorientasi pada pelatihan lapangan sehingga *skill* penyuluh pertanian lebih menunjukkan pada

kompetensi dan kinerja. Disamping itu, dengan melakukan analisis kebutuhan pelatihan maka akan memperoleh materi yang sesuai dengan kebutuhan penyuluh pertanian. Pelatihan harus dibedakan berdasarkan kebutuhan kerja, kompetensi ditunjukkan dari *follow up* pelatihan, pelatihan yang baik disesuaikan dengan jenis pekerjaan sehingga hasil dari pelatihan pertanian bisa langsung diterapkan dilapangan oleh penyuluh pertanian dan dapat dilihat dari :



Tabel 1. 4

Jenis Kegiatan Pelatihan dan Pendidikan Dinas Pertanian dan Balai penyuluh
Pertanian Kecamatan Barru Kabupaten Barru 2018/2019

No	Materi	Kegiatan Metode	Volume	Lokasi	Waktu	Sumber Biaya	Penanggung Jawab	Pelaksana	KE T
1	Tahapan pengolahan tanah yang tepat	Anjongsana Pertemuan Diskusi	16 Kali	Nawaru I Nawaru II Rajawali Mekar Bina Baru	November 2019	APBN/ APBD/ swadaya	PPL dan Instansi terkait	Kelompok Tani	✓
2	Keuntungan menggunakan benih unggul, bermutu dan berlabel	Anjongsana pertemuan Demplot	8 Kali	Nawaru I Nawaru II Rajawali Mekar Bina Baru	Desember 2019	APBN/ APBD/ swadaya	PPL dan Instansi terkait	Kelompok Tani	✓
3	Keuntungan menggunakan pemupukan yang berimbang	Anjongsana Pertemuan Demplot	16 Kali	Nawaru I Nawaru II Rajawali Mekar Bina Baru	Januari 2020 s/d Maret 2020	APBN/ APBD Swadaya	PPL dan Instansi terkait	Kelompok Tani	✓
4	Teknik pengendalian hama dan penyakit dan gejala serangannya dengan tepat	Anjongsana Pertemuan Diskusi	8 Kali	Nawaru I Nawaru II Rajawali Mekar Bina Baru	Desember 2019 s/d April 2020	APBN/ APBD Swadaya	PPL dan Instansi terkait	Kelompok Tani	✓
5	Keuntungan penggunaan POC (Pupuk Organik Cair) dapat meningkatkan	Anjongsana Pertemuan Demplot	16 Kali	Nawaru I Nawaru II Rajawali Mekar Bina Baru	Januari 2020 s/d Maret 2020	APBN/ APBD Swadaya	PPL dan Instansi terkait	Kelompok Tani	✓

6	produksi Keuntungan menggunakan benih yang unggul, bermutu dan berlabel pada tanaman padi (Gadu)	Anjangsana Pertemuan Demplot	8 Kali	Nawaru I Nawaru II Rajawali Mekar Bina Baru	Mei 2020	APBN/ APBD Swadaya	PPL dan Instansi terkait	Kelompok Tani	✓
7	Kelebihan dengan menggunakan pupuk organik	Anjangsana Pertemuan Demplot	16 Kali	Nawaru I Nawaru II Rajawali Mekar Bina Baru	Mei 2020 s/d Juni 2020	APBN/ APBD Swadaya	PPL dan Instansi terkait	Kelompok Tani	✓



Program atau jenis kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yakni Dinas Pertanian Kabupaten Barru dan Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Barru (Tabel 1.4) tentang pelatihan dan pendidikan yang dilaksanakan secara keseluruhan pelatihan yang dilaksanakan oleh Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan cukup dan memenuhi kriteria pelatihan serta pendidikan pada tahun 2018/2019 yang terlaksana dengan baik.

Berdasarkan hasil observasi penelitian penulis dilapangan terkait pemberdayaan kelompok tani oleh pemerintah dalam meningkatkan kapasitas petani dalam teori empowering dalam bentuk Pendidikan dan pelatihan sudah ada dan terlaksana; berdasarkan (Tabel 1.4) sesuai dengan teori apa yang ditemukan peneliti dilapangan bahwasanya telah terlaksananya Peningkatan kapasitas petani melalui Pendidikan dan pelatihan, tinggal bagaimana masyarakat dalam peningkatan kesadaran akan keikutsertaan terhadap program Pendidikan pelatihan yang telah di berikan oleh pemerintah karena pemerintah sudah tepat dalam memberikan pendidikan dan pelatihan yang memiliki pengetahuan dan keterampilan sesuai materi yang dapat meningkatkan kapasitas kelompok tani/masyarakat petani.

2. Penyuluhan dan Pendampingan

Pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh Pemerintah sesuai dengan kewenangannya memberi fasilitas penyuluhan dan pendampingan kepada petani. Penyuluh memberikan materi

penyuluhan dalam bentuk teknologi tertentu yang telah ditetapkan oleh pemerintah, sedangkan dalam pendampingan penyuluh memberikan arahan tentang cara cara yang dapat meningkatkan hasil panen masyarakat petani.

Penyuluhan berperan dalam peningkatan pengetahuan masyarakat petani akan teknologi maupun informasi-informasi pertanian guna meningkatkan kesejahteraan petani beserta keluarganya. Peran penyuluhan dalam memberikan pengetahuan kepada petani dapat berfungsi sebagai proses penyebaran informasi kepada petani, dan sebagai proses penerangan atau memberikan penjelasan, sebagai proses perubahan perilaku petani (sikap, pengetahuan, dan keterampilan) dan sebagai proses pendidikan. Penyuluhan merupakan bagian dari upaya dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum serta pemerintah yang mempunyai kewajiban untuk menyelenggarakannya. Tunggal (dalam Wijianto, 2016).

Berikut wawancara penulis dengan Kepala BP3K (Balai Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan) Kecamatan Barru, terkait penyuluhan kepada kelompok tani, sebagai berikut :

“Penyuluhan yang dilakukan kepada kelompok tani yaitu dengan menggerakkan para penyuluh sebagai pos simpul koordinasi pengawalan dan pendampingan dan melaksanakan pengawalan dan pendampingan terpadu penyuluh .” (Wawancara dengan AB, pada tanggal 29 september 2020).

Berdasarkan hasil wawancara dari Kepala Balai Penyuluhan Pertanian dapat disimpulkan bahwa yang dilakukan oleh penyuluh

adalah menggerakkan para penyuluh sebagai pos simpul koordinasi pengawalan dan pendampingan, dan melaksanakan pengawalan dan pendampingan terpadu penyuluh kepada kelompok tani setempat agar dapat memaksimalkan pelaksanaan penyuluhan dan pendampingan secara benar sehingga hasil dari pertanian dapat meningkatkan pendapatan masyarakat petani. Pemerintah dalam hal ini balai penyuluhan pertanian perikanan dan kehutanan (BP3K) Kecamatan Barru terkait Penyuluhan dan Pendampingan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan pangan yang terus meningkat perlu dilakukan pengawalan dan pendampingan dalam menggerakkan para petani untuk dapat menyiapkan teknologi. Penyuluh dan pihak yang membantu merupakan salah satu penggerak bagi para petani (pelaku utama) yang bisa berperan sebagai komunikator dan fasilitator melalui pengawalan dan pendampingan berkelanjutan.

Berikut wawancara penulis dengan tim penyuluhan Desa Palakka Kecamatan Barru, terkait proses penyuluhan, sebagai berikut:

"Proses penyuluhan dilakukan dilapangan maupun disawah, pinggir jalan atau dimana saja ada orang berkumpul, baik dijalan maupun rumah mereka dengan berdiskusi secara langsung karena pertemuan secara rutin yang dilakukan kadang tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan". (Wawancara dengan MN, pada 29 September 2020).

Adapun hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa jadwal pertemuan antara penyuluh dan masyarakat petani tidak cukup waktu dalam memberikan informasi didalam pertemuan sehingga petugas penyuluh memberikan informasi tentang pertanian kepada para

kelompok tani secara langsung, penyuluhan dilakukan secara langsung kepada kelompok tani setempat, baik dipersawahan masyarakat petani maupun di rumah atau sepanjang jalan tempat berkumpulnya masyarakat petani untuk memberikan penjelasan, sehingga proses perubahan perilaku petani (sikap, pengetahuan, dan keterampilan), dan sebagai proses pendidikan.

Berikut wawancara penulis dengan ketua kelompok tani pamarlete I terkait kesadaran masyarakat terhadap pelaksanaan penyuluhan, sebagai berikut :

“Seorang yang melakukan penyuluhan adalah orang dari luar sehingga para kelompok tani atau masyarakat petani tidak kenal dengan penyuluh tersebut, kendala lain yaitu dari kegiatan penyuluhan tersebut terdapat pada masyarakat itu sendiri, dimana kurangnya kesadaran masyarakat (Petani) dalam melakukan koordinasi dengan penyuluh” (Wawancara dengan HN, pada 30 september 2020).

Hal yang sama disampaikan dari ketua kelompok tani pamarlete

II mengemukakan bahwa :

“Kendala dari kelompok tani yang saya pimpin adalah kurangnya kesadaran dari masyarakat (anggota/petani) untuk ikut dalam penyuluhan dikarenakan tidak saling mengenal”, (Wawancara dengan KN, pada 3 oktober 2020).

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang ketua kelompok tani dapat disimpulkan bahwa dalam penyuluhan hal yang terpenting yaitu petugas penyuluh harus mengenal masyarakat

setempat agar koordinasi antara petugas penyuluh dengan masyarakat petani dapat berjalan dengan baik. Hubungan antara penyuluh harus saling mengenal dengan baik agar kerjasama antara keduanya dapat

berjalan sesuai dengan rencana. Penyuluh sangat membantu para petani untuk dapat menganalisis dan menafsirkan situasi yang sedang berkembang, sehingga petani dapat membuat perkiraan kedepan dan meminimaliskan kemungkinan masalah yang akan dihadapi.

Berikut wawancara penulis dengan salah seorang informan dari masyarakat, terkait efektivitas penyuluh yang mengemukakan bahwa :

“Penyuluhan sudah berjalan sejak lama sebagai kendala dari penyuluhan yaitu penyuluh tidak diundang jika ada acara pertemuan dilapangan atau kantor desa” (Wawancara dengan RN, pada 04 oktober 2020).

Hal yang sama disampaikan salah seorang infoman dari masyarakat mengemukakan bahwa:

“Penyuluhan sebenarnya berjalan tapi dari pandangan saya bahwa biasanya ada pertemuan kurangnya kesadaran masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan rutin (pertemuan penyuluh)” (Wawancara dengan HG, pada 04 oktober 2020).

Hasil wawancara menunjukkan bahwa penyuluhan selama ini sudah terlaksana hanya saja koordinasi antara petugas penyuluh dengan masyarakat petani masih terhambat sehingga jadwal pertemuan kadang tidak dihadiri oleh petugas penyuluh. Dalam berbagai pertemuan yang dilakukan petani sangat jarang atau sedikit yang memberi waktu untuk menghadiri rapat-rapat dibalai desa. Hal ini menyebabkan tidak semua petani mendapatkan informasi yang telah disampaikan. Dalam hal ini salah satu indikator berperannya penyuluh pertanian adalah perkembangan kelompok tani yang ditunjukkan

melalui kemampuan baik dalam hal teknis maupun manajemen usahatani yang dijalankan.

Berdasarkan hasil observasi peneliti di lapangan menunjukkan bahwa penelitian dilakukan di Dusun Camming terkait pemberdayaan kelompok tani oleh pemerintah dalam meningkatkan kapasitas petani melalui penyuluhan dan pendampingan yaitu sudah ada pendampingan yang dilakukan Balai Penyuluhan Pertanian hanya saja koordinasi antar penyuluh pertanian dengan kelompok tani masih terhambat jadwal pertemuan terkadang tidak dihadiri oleh penyuluh dan dalam berbagai pertemuan yang diadakan di balai desa hanya sedikit yang menghadiri atau memberikan waktunya dalam rapat tersebut. Hal tersebut terjadi karena kurangnya informasi yang didapatkan oleh petani. Padahal kegiatan ini dapat bermanfaat baik untuk peningkatan kapasitas petani ataupun arahan agar dapat meningkatkan hasil panen petani.

3. *Protecting*

Pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh Pemerintah sesuai dengan kewenangannya yaitu melindungi kepentingan masyarakat petani untuk bisa lebih bertahan dan berkembang, dalam hal ini pemerintah memberikan kepastian atau perlindungan harga dan pengembangan sistem, sarana pemasaran hasil pertanian. Pemerintah dengan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pemberdayaan petani melalui pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian dengan memfasilitasi pengembangan hasil pasar pertanian

yang di miliki atau dikelola oleh kelompok tani , koperasi atau kelembagaan ekonomi petani lainnya didaerah produksi komoditas pertanian, dan mengembangkan sistem pemasaran dari promosi hasil pertanian serta membatasi pasar modern yang bukan dimiliki atau bekerja sama dengan kelompok tani .

Seperti yang dikemukakan oleh kepala BP3K (Balai penyuluh pertanian perikanan dan kehutanan) kecamatan Barru, Bahwa:

“Pemerintah daerah dalam pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian dalam hal ini balai penyuluh pertanian kami membatasi penjualan yang bukan bagian dari kami maksudnya ialah hasil produksi yang di hasilkan akan di pasarkan yang dimiliki oleh atau yang bekerjasama dengan kelompok tani, gabungan kelompok tani koperasi yang dimiliki setiap desa atau kelurahan dan kelembagaan ekonomi petani yang berada di daerah produksi komoditas pertanian.” (Wawancara dengan AB, pada 28 september 2020).

Menurut undang-undang No 19 tahun 2013, pasal 48 ayat (2) tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani Pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan:

- a. Mewujudkan pasar hasil Pertanian yang memenuhi standar keamanan pangan, sanitasi, serta memperhatikan ketertiban umum;

Kinerja pemasaran produk pertanian yang baik, khususnya pangan, akan mendorong petani menghasilkan pangan melebihi kebutuhan rumah tangga. Petani akan memasarkan sebagian produksinya setelah dikurangi untuk kebutuhan konsumsi rumah tangga (*marketed surplus* atau *marketable surplus*). Hasil panen yang

dijual digunakan oleh petani untuk membayar tenaga kerja, sarana produksi, sewa lahan maupun kebutuhan sehari-hari. Pemasaran juga memberi insentif kepada petani agar menghasilkan produk sesuai kebutuhan konsumen serta mengikuti standar pemasaran yang berlaku. Bahkan petani bersedia memproduksi pangan yang bukan merupakan pangan pokok karena produknya laku dijual dan menguntungkan.

Kinerja pemasaran diukur dari keuntungan yang diperoleh produsen (petani) atau persentase harga yang diterima petani dibanding harga eceran, efisiensi rantai pemasaran, dan keterjangkauan harga produk oleh konsumen, menurut (Sayaka, 2013). Intervensi pemerintah dapat mempengaruhi kinerja pasar. Untuk komoditas pangan yang bersifat strategis, intervensi pemerintah umumnya dapat membuat kinerja pasar menjadi lebih baik.

- b. Mewujudkan terminal agribisnis dan subterminal agribisnis untuk pemasaran hasil Pertanian;
- c. Mewujudkan fasilitas pendukung pasar hasil Pertanian;

Berikut wawancara penulis dengan PPL Desa palakka, Terkait sarana dan prasarana pertanian, sebagai berikut :

“Keberhasilan dari subsektor pertanian seharusnya didukung oleh sarana dan prasarana pertanian yang cukup memadai dari tahap persiapan sampai pada tahap pemasaran hasil tapi karena segala keterbatasan yang ada belum dapat dipenuhi/dimiliki oleh petani maupun kelompok tani, yang ada jembatan serta sarana transportasi dan informasi untuk menunjang mobilitas kegiatan usaha tani masih sangat terbatas ” (Wawancara dengan MN, pada 28 september 2020)

- d. Memfasilitasi pengembangan pasar hasil Pertanian yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani, koperasi, dan/atau kelembagaan ekonomi Petani lainnya di daerah produksi Komoditas Pertanian;
- e. Membatasi pasar modern yang bukan dimiliki dan/atau tidak bekerja sama dengan Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani, koperasi, dan/atau kelembagaan ekonomi Petani lainnya di daerah produksi Komoditas Pertanian;
- f. Mengembangkan pola kemitraan Usaha Tani yang saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan;
- g. Mengembangkan sistem pemasaran dan promosi hasil Pertanian;
- h. Mengembangkan pasar lelang;
- i. Menyediakan informasi pasar; dan
- j. Mengembangkan lindung nilai.

Berdasarkan hasil observasi peneliti dilapangan menunjukkan bahwa pada saat melakukan penelitian di Kantor Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Barru sudah ada perlindungan pemerintah dalam hal ini Dinas Pertanian dan BP3K baik dalam hal pembatasan penjualan hasil panen dan perlindungan harga jual panen dengan tidak melakukan penjualan yang bukan dari hasil Kerjasama dari kelompok tani yang ada di Dusun Camming. hanya saja dalam sarana pemasaran hasil pertanian belum maksimal karena harga penjualan hasil tani yang sangat rendah. Dengan

demikian petani tidak bisa memenuhi kekurangan biaya produksi pertanian dan biaya kebutuhan hidup karena adanya kerugian.

Dengan adanya pemberdayaan kelompok petani oleh pemerintah dalam hal ini Balai Penyuluh Pertanian dalam meningkatkan kapasitas petani baik sebagai fasilitator, motivator dan mediator bagi petani, dalam perkembangan potensi yang dimiliki Dusun Camming sebelum adanya pemberdayaan dari pemerintah, masyarakatnya hanya bertani secara tradisional atau secara turun temurun dan banyak memakan waktu dan tenaga terkuras, sedangkan hasil panen mereka hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya saja. Tetapi setelah adanya pemberdayaan masyarakat dari pemerintah dalam hal ini Dinas pertanian dan Balai penyuluh pertanian untuk menjadikan masyarakat yang berdaya dan menjadikan masyarakat petani yang mandiri, memiliki pengetahuan dan keterampilan melalui pemberian bantuan dan alat-alat pertanian, membina para petani, dimana setelah adanya pemberdayaan dari pemerintah sekarang masyarakat Bertani dengan sangat mudah karena sudah mengenal alat alat pertanian dan pola tanam yang baik dari pemerintah yang memakan waktu yang tidak lama mulai dari proses penggarapan sampai proses panen masyarakat dan hasil panennya pun meningkat.

Tabel 1.5 Adapun hasil produksi padi dari tahun 2017-2020 di Dusun Camming Desa Palakka Kabupaten Barru:

TAHUN	PRODUKSI
2017	4,5 ton/ ha
2018	5,7 ton/ Ha
2019	6,5 ton/Ha
2020	7 ton/Ha

Tabel: Data diolah, 2020

Berdasarkan tabel diatas penulis menyimpulkan bahwa sebelum adanya pemberdayaan dari pemerintah dalam satu hektar hanya menghasilkan 3 Ton/ha, namun setelah adanya pemberdayaan dimana masyarakat sudah mulai mengenal namanya alat pertanian dan Bertani secara modern sudah bisa meningkatkan hasil panen mereka selama 4 tahun berturut-berturut dan itu menunjukkan bahwa pemberdayaan berjalan Di Dusun Camming Desa Palakka Kabupaten Barru, walaupun belum terlalu maksimal tapi dapat meningkatkan pengetahuan dan hasil panen petani dan bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga dan penjualan hasil panen masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Dusun Camming Desa Palakka Kabupaten Barru mengenai pemberdayaan masyarakat petani dalam meningkatkan hasil padi melalui program kelompok tani pamarlete Dusun Camming Desa Palakka Kabupaten Barru. Maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa :

1. *Enabling*, yaitu memungkinkan pemerintah termasuk dinas pertanian dan Balai Penyuluh Pertanian dalam memberdayaan masyarakat sudah terlaksana, pemberian bantuan dana dan alat alat pertanian kepada kelompok tani di Dusun Camming, Desa Palakka dalam rangka mempermudah petani mulai dari pengelolaan lahan pertanian sampai pada hasil pengelolaan panen padi mereka, dimana dengan adanya bantuan dari pemerintah tidak mengambil banyak waktu dan menguras tenaga para petani yang ada di Dusun Camming Desa Palakka, namun dengan adanya
2. *Empowering*, yaitu peningkatan kapasitas petani oleh pemerintah dalam memberdayaan masyarakat petani dengan cara pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan terlaksana sudah cukup bagus karena dalam penyuluh sudah tepat dalam memberikan pelatihan yang memiliki pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan materi serta suasana pelatihan yang nyaman sehingga peserta lebih mudah dalam menerima materi.

3. *Protecting*, yaitu pemberian perlindungan kepada petani oleh pemerintah dalam Pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian, berdasarkan hasil observasi penulis temukan dilapangan pembatasan penjualan oleh pemerintah sudah terlaksana namun belum maksimal pada sarana dan prasarana yang belum memadai sedangkan kebutuhan sarana penting disampaikan kepada Badan penyuluh pertanian karena sarana adalah pendukung dalam kegiatan usaha badan penyuluh pertanian, tetapi pada kenyataannya masyarakat petani belum semuanya mampu secara swadaya membeli traktor, pompa dan lain-lain.

B. Saran

Adapun saran yang dapat peneliti berikan berdasarkan penelitian dan observasi sehingga dapat dijadikan masukan untuk kedepannya, yaitu sebagai berikut :

1. Kiranya petugas penyuluh menjalin kerjasama yang baik dengan pihak-pihak pemerintah maupun masyarakat petani agar program pemberdayaan dapat terlaksana dengan lancar.
2. Perlunya meningkatkan sarana dan prasarana seperti pengadaan alat-alat untuk menunjang budidaya serta mensejahterakan masyarakat petani yang belum sepenuhnya diperhatikan.
3. Perlunya peningkatan pemberian sosialisasi program kepada masyarakat petani agar supaya lebih digiatkan sehingga tepat pada sasaran dan semua masyarakat petani mendapatkan manfaat dari program yang dilaksanakan.

4. Perlu adanya kesadaran dari masyarakat petani lain yang belum mengikuti kegiatan kelompok tani tersebut agar diharapkan dapat mengikuti kegiatan seperti itu karena kegiatan tersebut sangat bermanfaat untuk meningkatkan hasil panen padi.



DAFTAR PUSTAKA

- Agus, H. (1996). *Konsep Pemberdayaan, Partisipasi Dan Kelembagaan Dalam Pembangunan*. 1987.
- Almasri, & Deswimar, D. (2004). *Peran Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Pembangunan Pedesaan*.
- Anggita. (2017). Pengaruh Pelatihan, Pengalaman Kerja Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Negeri Sipil. *Bisnis Dan Akuntansi*, 19(2), 76–81.
- Astuti, A. N. (2010). *Analisis Efektivitas Kelompok Tani Di Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo*.
- Febrianti, I. (2018). *Pemberdayaan Masyarakat Petani Dalam Meningkatkan Hasil Panen Padi Melalui Program Kelompok Tani (Studi Pada Kelompok Tani Sumbersari Dusun Sumbersari Pekon Kresnomulyo Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu)*.
- Hamdani, C. (2020). *Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Berusaha Tani Petani Milenial Alumni Pelatihan Kewirausahaan Bagi Petani Muda Di Provinsi Jawa Tengah*. 1(3), 61–73.
- Iskandar, D. (2007). *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Bidang Pertanian Oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Jadimulya Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Pangandaran*. 49–61.
- Kartasasmita, G. (1997). *Konsep Pembangunan Yang Berakar Pada Masyarakat. Pemberdayaan Masyarakat*, Sp 607, 1–25.
- Kasriani. (2019). Peran Kelompok Tani Dalam Meningkatkan Produktivitas Usaha Tani Padi. *Jurnal Agristan*, 1(2), 80–88.
- Kelbulan, E. . ., Tambas, J. S., & Parajouw, O. . . (2018). Dinamika Kelompok Tani Kalelon Di Desa Kauneran Kecamatan Sonder. *Agri-Sosioekonomi*, 14(3), 55. <https://doi.org/10.35791/Agrosoek.14.3.2018.21534>
- Kuntariningsih, A., & Mariyono, J. (2013). Dampak Pelatihan Petani Terhadap

Kinerja Usahatani Kedelai Di Jawa Timur. *Sosiohumaniora*.

<https://doi.org/10.24198/Sosiohumaniora.V15i2.5739>

Loedy, F. H. (2020). *Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi Publik (Jmiap)*. 2(2), 70–79.

Margayaningsih, D. I. (2016). Pemberdayaan Masyarakat Desa Sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan. *Pemberdayaan Masyarakat Desa Sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan*.

Maryani, D. (2019). *Pemberdayaan Masyarakat*. Deepublish Publisher.

Maspaitella, M. J. (2014). *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pendekatan Pekerja Sosial Social Welfare Development : Society Empowerment In Social Worker Approach Nancy Rahakbauwi*. 157–164.

Mayasari, F., & Nangameka, Y. (2012). *Pengaruh Keberadaan Kelompok Tani Terhadap Pendapatan Usaha Tani Tembakau (Studi Kasus Di Desa Tlogosari Kecamatan Sumbermalang)*.

Muhammad, T. (2019). *Strategi Pemberdayaan Masyarakat (Studi Pada Kelompok Usaha Dapur Pesisir Oleh Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (Pkk) Kabupaten Kepulauan Meranti)*. 6, 1–15.

Mulyawan, D. R. (2016). *Masyarakat, Wilayah Dan Pembangunan* (G. Wawan (Ed.)).

Musa. (2017). Optimalisasi Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Masyarakat: Sebuah Tawaran Dalam Mengentaskan Kemiskinan. *Jurnal Dakwah Dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan*, 8(1), 107–125.

Nazaruddin, N., & Anwarudin, O. (2019). Pengaruh Penguatan Kelompok Tani Terhadap Partisipasi Dan Motivasi Pemuda Tani Pada Usaha Pertanian Di Leuwiliang, Bogor. *Jurnal Agribisnis Terpadu*.
<https://doi.org/10.33512/Jat.V12i1.5530>

Noor, M. (2011). Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Ilmiah*.

- Nuryanti & Swastika, D. K. S. (2011). Peran Kelompok Tani Dalam Penerapan Teknologi Pertanian Roles Of Farmers ' Groups In Agricultural Technology Adoption. *Forum Penelitian Agro Ekonomi*, 29(2), 115–128.
- Rahayu, E. S. (2010). *Pemberdayaan Masyarakat Petani Dalam Program Pekarangan Terpadu Di Desa Sambirejo Kecamatan Ngawen Kabupaten Gunungkidul*.
- Retno, S. S., Rohmiyati, Y., & Husna, J. (2015). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Perpustakaan: Studi Kasus Di Rumah Pintar "Sasana Ngudi Kawruh" Kelurahan Bandharharjo-Semarang. *Jurnal Ilmu Perpustakaan*, 4(2), 157–166. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jip/article/view/9518/0>
- Saleh, A. (2015). Pengertian, Batasan, Dan Bentuk Kelompok. *Dinamika Kelompok*, 1–64. <http://repository.ut.ac.id/4463/1/Luht4329-M1.Pdf>
- Sayaka, B. (2013). *Memperbaiki Kinerja Pengelolaan Pemasaran Produk Pangan*. 266–277.
- Siregar, A. (2020). Pengaruh Program Pelatihan Terhadap Motivasi Bekerja Karyawan Pada Pt. Kaltim Kariangau Terminal (Kkt) Di Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur. *Methosika: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Methodist*, 3(2), 113–119. <https://doi.org/10.46880/jsika.v3i2.44>
- Sugiri, L. (2012). Peranan Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Masyarakat. *Publica*, 56–65.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Edisi Kedua). Alfabeta.
- Tahrin, N., Rares, J. J., & Tampongangoy, D. (2019). Pemberdayaan Masyarakat Desa Malawor Distrik Makbon Kabupaten Sorong (Studi Tentang Program Percetakan Sawah). *Journal Of Chemical Information And Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Wahyuni, S. (1998). *Kinerja Kelompok Tani Dalam Sistem Usaha Tani Padi Dan*

Metode Pemberdayaannya. 70, 1-8.

Wijianto, R. D. (Rusita). (2016). Peran Penyuluh Pertanian Lapangan Dengan Tingkat Perkembangan Kelompok Tani Di Kabupaten Sukoharjo. *Agrista: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Agribisnis Uns.*

Sumber lain :

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 82/Permentan/OT.140/8/2013 tentang Pedoman Pembinaan Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani

SK Menteri Pertanian Nomor: 41/KPTS/ OT. 210/ 1992 Tentang Pembinaan Pemberdayaan Kelompok Tani Dan Nelayan.

Undang-undang nomor 19 tahun 2013 Tentang perlindungan dan pemberdayaan petani

Undang-undang Nomor 20 tahun 2013 Tentang Pendidikan

Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa

UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah,

LAMPIRAN**A. DOKUMENTASI WAWANCARA**

1. Wawancara dengan kepala kantor BP3K kec. Barru dan penyuluh pertanian
Desa palakka





Bersama penyluh pertanian kecamatan barru



2. Wawancara dengan kelompok tani pamarlete







Bersama anggota kelompok tani pamarlete

B. DOKUMENTASI DATA SEKUNDER





**DATA KELEMBAGAAN TANI
BP3K KECAMATAN BARRU
TAHUN :**

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. DESA SIKUNG	1	7	2	-	5	1	3	-	-	-
2. TURUNG	1	8	2	-	-	-	-	-	-	-
3. SEPEK	1	15	2	-	-	-	-	-	-	1
4. BANGEMPAK	1	18	3	-	6	6	2	-	-	-
5. SIKUNG	1	7	9	-	-	-	-	-	-	1
6. PALAKA	1	15	5	-	-	-	-	-	-	1
7. TOMPO	1	15	1	-	-	-	-	-	-	2
8. GALLUNG	1	10	3	-	-	-	-	-	-	2
9. ANABANGA	1	8	1	-	-	-	-	-	-	2
JUMAH	10	95	18	-	21	11	9	-	-	14

KEPALA BP3K KEC.BARRU,

C. SURAT PENELITIAN



PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jalan Soekarno Alauddin No. 259 (Cedung Al-Iqra Lt.5) Makassar 90221

Telp. (0411) - 866972, Faks. (0411) - 865588

Nomor : 894/FSP/A.1-VIII/VIII/42/2020
Lamp. : 1 (satu) Lampiran
Hal : Pengantar Penelitian

Kepada Yth.
Bapak Rektor, Cq. Lembaga Penelitian dan
Pengabdian pada Masyarakat (LP3M) Unismuh
Di -
Makassar

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan rencana penelitian mahasiswa untuk melengkapi data dalam
rangka Penulisan Skripsi, maka diharapkan kepada Bapak/Ibu kiranya dapat
memberikan Pengantar Penelitian kepada :

Nama Mahasiswa : Rapika Annisa
St a m b u k : 105641105616
J u r u s a n : Ilmu Pemerintahan
Judul Skripsi : Pemberdayaan masyarakat petani dalam meningkatkan hasil
panen padi melalui program Kelompok Tani Pamarlete Dusun
Camming, Desa Palakka, Kabupaten Barru
Lokasi Penelitian : Kantor Badan penyuluh pertanian dan kehutanan kecamatan
Barru, kabupaten Barru dan Kantor Dusun Camming, Desa
Palakka, Kabupaten Barru.

Demikian Pengantar Penelitian ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya yang
baik, diucapkan banyak terima kasih.

Jazakumullahu Khaeran Katziraa.
Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Makassar, 26 Agustus 2020


Dr. Nurvaf Mustari, S.P., M.Si
NBM. 1031 102



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

Nomor : 5565/S.01/PTSP/2020
Lampiran :
Perihal : Izin Penelitian

Kepada Yth.
Bupati Barru

d.
Tempat

Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor : 1240/05/C.4/VIII/III/41/2020 tanggal 31 Agustus 2020 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama	RAPIKA ANNISA
Nomor Pokok	105641105016
Program Studi	Ilmu Pemerintahan
Pekerjaan/Lembaga	Mahasiswa (S1)
Alamat	Jl. Sa'Abuddin No. 259, Makassar

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul:

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PETANI DALAM MENINGKATKAN HASIL PANEN PADI MELALUI PROGRAM KELOMPOK TANI PAMARLETE DUSUN CAMMING DESA PALAKKA KABUPATEN BARRU *

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. 04 September s/d 03 November 2020

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dan Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan barcode.

Demikian surat izin penelitian ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada tanggal : 04 September 2020

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN
Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu

Dr. JAYADINAS, S.Sos., M.Si
Pangkat : Pembina Tk. I
Nip : 19710501 199803 1 004

Tersusun VP:
1. Kertas LP3M UNISMUH Makassar di Makassar
2. Perangko

SSSP/PTSP 04.09.2020



Jl. Bougainville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : <http://damap.su.seprov.go.id> Email : psd@sulseprov.go.id
Makassar 90231



PEMERINTAHAN KABUPATEN BARRU
DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA KABUPATEN BARRU
 Mal Pelayanan Publik Masiga Lt. 1-3 Jl. Jenderal Uru Telp. (0427) 21663, Fax (0427) 21410
<http://online.barrukab.go.id> e-mail : barrudmptsp@gmail.com Kode Pos 90711

Barro, 28 September 2020

Nomor : 294/DP/DPMTSP/PTK/IX/2020
 Lampiran : -
 Perihal : Izin/Rekomendasi Penelitian

Kepada
 Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
 Tenaga Kerja Kabupaten Barru

Tempat

Berdasarkan Surat dari Kepala DPMTSP Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 356/S/DP/PTSP/2020 tanggal 04 September 2020 perihal tersebut di atas, maka Mahasiswa (di) / Peneliti / Dosen / Pegawai di bawah ini :

Nama : RAPIKA ANNISA
 Nomor Pokok : 105641105616
 Program Study : Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
 Pekerjaan : Mahasiswa (SI)
 Alamat : Dusun Camming Desa Palakka Kec. Barru Kab. Barru

Diberikan izin untuk melakukan Penelitian/Pengambilan Data di Wilayah/Kantor Saudara yang berlangsung mulai tanggal 29 September 2020 s.d 29 November 2020, dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul :

"PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PETANI DALAM MENINGKATKAN HASIL PANEN PADI MELALUI PROGRAM KELOMPOK TANI PAMARIETE DUSUN CAMMING DESA PALAKKA KAB. BARRU"

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan melapor kepada Kepala SKPD (Unit Kerja) Camat, apabila kegiatan dilaksanakan di SKPD (Unit Kerja) / Kecamatan setempat,
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan,
3. Menjalani semua Peraturan Perundang Undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat,
4. Menyerahkan (satu) eksemplar copy hasil penelitian kepada Bupati Barru Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Barru,
5. Surat izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin ini tidak mematuhi ketentuan tersebut di atas.

Untuk terlaksananya tugas penelitian tersebut dengan baik dan lancar, diminta kepada Saudara(n) untuk memberikan bantuan fasilitas seperlunya.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan dipergunakan seperlunya.

a.n. Kepala Dinas,
 Kabid. Penyelenggaraan Pelayanan
 Perizinan,

FATMAWATI LEBUISE
 Pangkat : Pembina, IV/a
 NIP. 19720910 199803 2 008

TEMBUSAN : disampaikan Kepada Yth.

1. Bupati Barru (Sebagai Laporan),
2. Kepala Bappeda Kab. Barru,
3. Ketua L.P3M UNISMUH Makassar di Makassar,
4. Mahasiswa yang bersangkutan,
5. Pertinggal.

PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
DINAS PERTANIAN
 Jln. H. M. Saleh Lawa No.58 Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan,
 Telp./Faks. (0427) 21028, E-Mail : pertanian.barru@yahoo.co.id kode pos: 90712

Baru, 30 September 2020

Nomor : 300.2/1525/Pert/IX/2020
 Lampiran : -
 Perihal : Izin/Rekomendasi Penelitian

Kepada :
 Yth. Kepala BPP Kec. Barru
 Di -
 Tempat

Menindaklanjuti surat Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Barru Nomor : 284/IP/DPMTSPTK/IX/2020, tanggal 28 September 2020, Perihal Izin/Rekomendasi Penelitian yang akan berlangsung selama mulai pada tanggal 29 September 2020 s/d 29 November 2020, maka kami mohon dukungan BPP Kecamatan Barru untuk menerima mahasiswa berikut :

Nama	RAPIKA ANNISA
Nomor Pokok	105641105616
Program Study	Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Alamat	Dusun Camming Desa Palakka Kec. Barru Kab. Barru

Demikian penyampaian dari kami, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.


Ir. AHMAD, S.M.
 Pengkaji / Pembina Utama Muda
 NIP. 19680512 198803 1 011



PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
BALAI PENYULUHAN PERTANIAN (BPP)
KECAMATAN BARRU

Jl. Pahlawan Ling. Bata Bata Kec. Barru Kab. Barru Email : bp2k.barru@gmail.com

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

No : 048/BPP-BR/XII /2020

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ACHMAD BASO, S. ST**
NIP : 19610906 198803 1 008
Jabatan : Koordinator Penyuluh Pertanian Kecamatan Barru
Alamat : BTN Botise Kel. Lalolung Kec. Tanete Rilau

Menerangkan bahwa :

Nama : **RAPIKA ANNISA**
Nim : 105641105616
Jurusan : Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Makassar
Waktu Penelitian : 29 September s/d 29 Nopember 2020
Lokasi : BPP Kecamatan Barru Kabupaten Barru
Alamat : Camming Desa Palakka

Bahwa yang bersangkutan sebagai Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makassar , telah selesai melaksanakan Penelitian dalam Bidang Ilmu Pemerintahan sejak 29 September 2020 sampai dengan 29 Nopember 2020 di Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan Barru .

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk di jadikan bahan dalam penyelesaian Skripsi .

Barru, 09 Desember 2020

Koordinator Peny. Pert. Kec Barru

ACHMAD BASO, S. ST
NIP. 19610906 198803 1 008

RIWAYAT HIDUP

Rapika Annisa, Lahir di Kabupaten Barru pada tanggal 24 Desember 1997. Anak pertama dari pasangan Ayah Suhardin dan Ibu Napisah. Penulis menyelesaikan pendidikan di SD Inpres 44 Camming Barru pada tahun 2010. Pada tahun itu juga penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Barru hingga tamat pada tahun 2013. Kemudian melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 Barru. Selanjutnya pada tahun 2016 penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Muhammadiyah Makassar pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan mengambil program studi Ilmu Pemerintahan, pada tahun 2021 ini akan mengantarkan penulis untuk meraih gelar Sarjana Strata Satu (S1) dengan menyusun karya ilmiah dengan judul Pemberdayaan Kelompok Tani Oleh Dinas Pertanian Dan Balai Penyuluh Pertanian Perikanan dan Kehutanan Kecamatan Barru (BP3K) Dalam Meningkatkan Hasil Panen Padi di Dusun Camming, Desa Palakka, Kabupaten Barru.